

**PARTISIPASI POLITIK NU DI MADURA PADA PEMILU
TAHUN 1955**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Moh. Diyauddin
NIM: 211104040014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

**PARTISIPASI POLITIK NU DI MADURA PADA PEMILU
TAHUN 1955**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Studi Islam
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



Oleh:

Moh. Diyauddin

NIM: 211104040014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

**PARTISIPASI POLITIK NU DI MADURA PADA PEMILU
TAHUN 1955**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Studi Islam
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Moh. Diyauddin
NIM: 211104040014
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP.197302272000031001

**PARTISIPASI POLITIK NU DI MADURA PADA PEMILU
TAHUN 1955**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Studi Islam
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari: Rabu

Tanggal: 11 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197112172000031001


Ahmad Hanafi, M.Hum.
NIP. 198708182019031004

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota:

1. Dr. H. Amin Fadlillah, SQ., MA.
2. Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

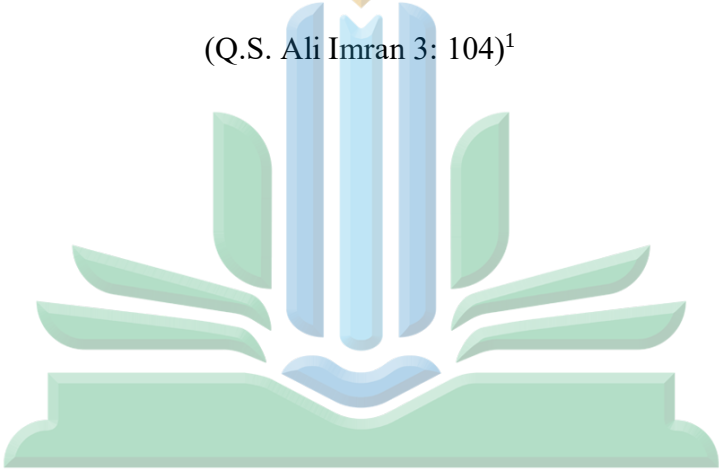

Prof. Dr. Anidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
mereka adalah orang-orang yang beruntung."

(Q.S. Ali Imran 3: 104)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019), 84.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan tulus dan ikhlas, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian sejarah perpolitikan Islam Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika partisipasi politik Nahdlatul Ulama di Madura pada Pemilu 1955.
2. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai institusi yang telah memberikan ruang, ilmu, dan pengalaman akademik yang bermakna, serta menambah referensi kepustakaan di bidang sejarah Islam Indonesia.
3. Kepada seluruh pihak yang memiliki ketertarikan pada sejarah politik Islam di Indonesia, semoga karya ini menjadi tambahan pengetahuan dan bahan kajian lebih lanjut tentang peran organisasi keagamaan dalam sistem demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa rahmat, hidayah, inayah, serta petunjuk-Nya kejalan yang benar. Sholawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan revolusioner bagi kehidupan manusia dengan membimbingnya dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Humaniora pada Prodi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Usuludin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Partisipasi Politik NU di Madura pada Pemilu Tahun 1955”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Prof. Dr. Ahidul Asror M.Ag. dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
3. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
4. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Fawaizul Umam M.Ag. yang selalu memberikan motivasi dan meyakinkan penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.

5. Dosen Pembimbing Akademik Muhammad Faiz, M.A. yang selalu sabar membimbing, memberikan arahan, dan dukungan kepada saya terkait semua hal yang berkaitan dengan perkuliahan.
6. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan sukarela mentransfer, membagi teori-teori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi-informasi yang diberikan sangat membantu penulis mulai awal kuliah hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk seluruh keluarga besar penulis, terutama ibu dan bapak yang selalu mendukung baik berupa material maupun doa yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Kepada anggota rumah yang selalu sabar menanti penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Sejarah Peradaban Islam angkatan 2021, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepuh hati penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 18 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Moh. Diyauddin. 2025. *Partisipasi Politik NU di Madura pada Pemilu Tahun 1955.*

Partisipasi politik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi modern, dan Pemilu 1955 menjadi tonggak utama dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam dinamika tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelumnya dikenal sebagai organisasi sosial-keagamaan turut mengukuhkan posisinya sebagai aktor politik dengan beralih fungsi menjadi partai politik pada tahun 1952. Transformasi ini tidak hanya membawa implikasi nasional, tetapi juga berdampak kuat di tingkat lokal, khususnya di wilayah Madura yang dikenal sebagai basis tradisional NU.

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama: (1) Bagaimana partisipasi politik NU di Madura pada Pemilu tahun 1955? (2) Bagaimana kontribusi politik elemen kiai pada kemenangan partai NU di Madura? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dinamika partisipasi politik NU di Madura pada Pemilu tahun 1955 serta menelusuri bentuk kontribusi nyata elemen kiai dalam perpolitikan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode sejarah, yang didukung oleh berbagai arsip primer seperti laporan hasil pemilu, surat kabar lokal, hingga dokumen organisasi NU. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi politik dari Herbert McClosky serta teori patron-klien dari James C. Scott, yang mencerminkan relasi antara kiai dan masyarakat Madura dalam praktik politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, partisipasi politik NU di Madura pada Pemilu 1955 menunjukkan dominasi signifikan, di mana NU memperoleh suara terbanyak dibanding partai lain di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh NU sebagai partai baru yang mampu mengorganisir basis massa tradisional melalui jejaring pesantren dan kiai. *Kedua*, peran kiai sebagai patron politik sangat menentukan arah pilihan masyarakat Madura. Hubungan patron-klien antara kiai dan masyarakat menciptakan mobilisasi politik yang efektif, menjadikan NU tidak hanya sebagai kekuatan agama, tetapi juga kekuatan politik lokal yang mampu memengaruhi hasil Pemilu.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, NU, Pemilu 1955

DAFTAR ISI

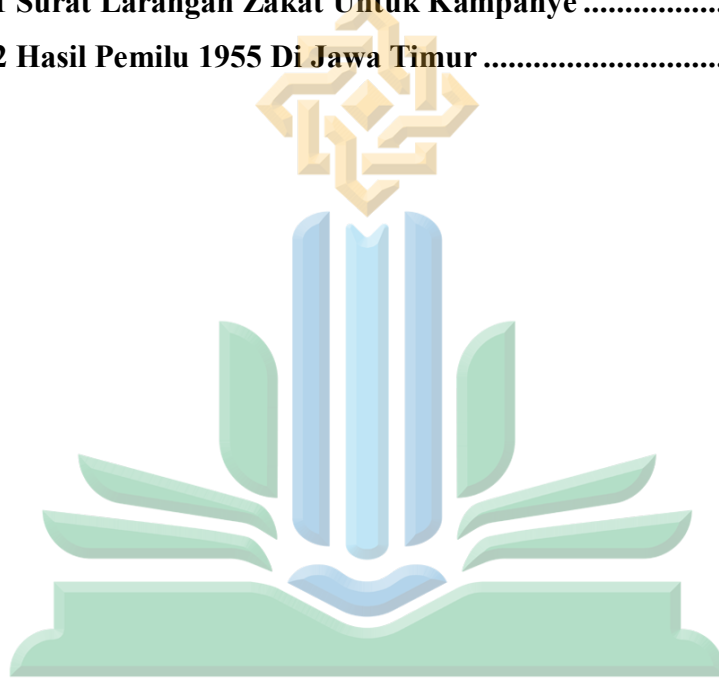
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Studi Terdahulu	10
G. Kerangka Konseptual	16
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II PARTISIPASI POLITIK NU DI MADURA PADA PEMILU TAHUN 1955.....	32
A. Kondisi Nasional Menuju Partai Nahdlatul Ulama.....	32
B. Transisi Pergolakan Politik Lokal Menjelang 1955	44

BAB III KONTRIBUSI POLITIK KAUM NAHDLIYIN PADA PEMENANGAN PARTAI NU DI MADURA	65
A. Agenda Politik NU di Pulau Madura	65
B. Visi- Misi NU di Pulau Madura	71
C. Hasil Pemilu dan Dampaknya Terhadap Politik Madura	79
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIODATA PENULIS	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Madura	46
Gambar 3. 1 Surat Larangan Zakat Untuk Kampanye	72
Gambar 3. 2 Hasil Pemilu 1955 Di Jawa Timur	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Nama-Nama Ketua/WK Ketua DPRD NU Se Madura85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip kedaulatan rakyat juga tercantum dalam sila ke-5 Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Beberapa contoh penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia, di antaranya: Pemilihan Umum, Referendum, Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, Kontrol terhadap pemerintah, Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat.

Pemilihan Umum merupakan komponen fundamental dari sebuah negara demokratis. Pemilu, dalam praktiknya, adalah proses pemilihan pemimpin untuk menduduki jabatan politik tertentu. Ada banyak jenis jabatan yang berbeda, mulai dari kepala desa hingga presiden dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Menurut buku Pengantar Hukum Pemilu karya Fajlurrahman Jurdi,¹ Pemilu adalah cara untuk mempraktikkan kedaulatan rakyat. Undang-undang mengatur peraturan dan pedoman untuk Pemilu. Indonesia mengadakan pemilu pertama kali pada tahun 1955.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu sarana penting dalam sistem demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), 1.

akan menjabat dalam pemerintahan. Dalam sejarah Indonesia, Pemilu telah menjadi bagian integral dari proses politik yang berlangsung sejak kemerdekaan. Salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam proses politik ini adalah Nahdlatul Ulama (NU). NU adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1926 dan memiliki basis massa yang luas di Indonesia.²

Pada tanggal 18 Agustus 1945, pada saat itu, Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera menunjuk Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden republik Indonesia pertama kali. Selanjutnya, pada 3 November 1945, Mohammad Hatta, yang memegang posisi wakil presiden, mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3, yang mengajukan saran untuk majelis partai-parpol yang bertujuan membuat pengaturan untuk pemilihan mendatang yang dijadwalkan tahun 1946. Informasi ini, dilambangkan sebagai Maklumat X, memberikan pengakuan resmi kepada entitas politik yang telah didirikan sebelumnya selama periode pemerintahan Belanda dan Jepang.³

Arahan Maklumat X, di samping pembentukan entitas politik, mencakup penyelenggaraan pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada Januari 1946. Sayangnya, pelaksanaan inisiatif ini menghadapi kendala yang berasal dari kurangnya kerangka hukum yang mengatur proses pemilu. Lebih

² Siti Honiah Mujiati, Ulfiah, Ujang Nurjaman, "Relasi Aswaja An-Nahdliyah dan Negara", dalam *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam* Vol. 7 No.1. 2022. <https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v7i1.570>

³ Matthew Tommy Liling, "Kajian Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai Sederhana," *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, no. 3 (2013): 491–508, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

jauh lagi, situasi keamanan yang genting di dalam Negara, ditambah dengan keprihatinan yang berlaku baik dari rakyat maupun pihak berwenang, berkisar pada menjaga kedaulatan Indonesia.⁴

Pemilu 1955 di Indonesia menyoroti banyak tantangan unik yang dihadapi dalam proses penyesuaian strategi pemilu agar sesuai dengan persyaratan spesifiknya. Masalah signifikan yang terkait dengan ini adalah tantangan yang cukup besar untuk mencegah entitas pemerintah daerah dan pusat dari campur tangan dalam urusan partai. Aspek penting lainnya yang membedakan pemilihan umum 1955 di Indonesia dari yang ada di banyak negara Barat adalah perbedaan substansif antara wacana nasional seputar isu-isu kunci dan upaya kampanye akar rumput, di samping tanggapan pemilih yang terbatas terhadap dinamika politik nasional.⁵

Salah satu keunggulan masyarakat demokratis adalah pelaksanaan proses pemilihan yang transparan dan adil. Proses pemilihan berfungsi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, di mana warga negara memainkan peran penting dalam menentukan lintasan pemerintahan nasional. Indonesia melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) perdana pada tahun 1955 dengan tujuan memilih perwakilan untuk Parlemen dan Majelis Konstituante. Pemilihan tahun 1955 dilakukan dalam sistem dua fase, dengan fase awal terjadi pada tanggal 29 September untuk memilih anggota Parlemen dan fase berikutnya pada 15 Desember untuk memilih anggota Majelis Konstituante.

⁴ Arif Sugitanata, Abdul Majid, Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, Jurnal Qoumiyyah, Vol.2 No.1, 2021, 3

⁵ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (Seri Laporan Sementara)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 132.

Sistem pemilihan yang digunakan dalam pemilihan 1955 didasarkan pada representasi proporsional tertutup.⁶

Dalam latar belakang lingkungan khusus ini pada bulan September 1955, Pemilihan Umum ini merupakan kali pertama yang berlangsung di Indonesia dengan tujuan memilih perwakilan parlemen. Selain itu, pada bulan Desember 1955, ada pemilihan terpisah yang dilakukan untuk anggota Majelis Konstituante yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Hasil Pemilu 1955 menunjukkan munculnya empat parpol yang dominan sebagai pemenang utama, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).⁷

Hasil penghitungan suara selama proses pemilihan 1955 menunjukkan bahwa PNI dan Masyumi mendapatkan jumlah kursi yang sama, sehingga tidak ada partai yang mencapai kemenangan telak pada tahun pemilihan tersebut. Masyumi muncul sebagai faksi politik Islam terkemuka, menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, meliputi Jabodetabek, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi berhasil mengamankan hanya sepertiga suara yang diperoleh PNI, dan hanya setengahnya di Jawa Timur. Keadaan ini mengakibatkan dominasi nasional Masyumi ditantang

⁶ Arif Sugitanata, Abdul Majid, Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, Jurnal Qoumiyyah, Vol.2, No.1, 2021, 3-4.

⁷ Lukman Ramdhani Firmansyah, Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955, Jurnal Avatara, Vol.1 No.1, 2013, 55.

dan akhirnya terganggu oleh PNI.⁸

Ada yang menarik pada pemilu yang terjadi wilayah di Jawa Timur, meskipun partai NU bisa dibilang partai baru namun NU dapat berkembang pesat. mengacu pada hasil pemilu 1955 di Jawa Timur, partai NU menang telak atas kompetitornya dimana partai NU saat itu memperoleh suara sekitar 3,3 juta suara, sedangkan partai yang memperoleh suara terbanyak kedua adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan perolehan suara sekitar 2,2 juta suara, selisih perolehan suara antara Partai NU dan PKI sekitar satu juta suara. Selaku pemenang pemilu 1955, PNI di Jawa Timur hanya memperoleh suara sekitar 2,1 juta suara berbanding tipis dengan perolehan suara PKI, sedangkan perolehan suara Masyumi di Jawa Timur hanya sekitar 1,06 juta suara yang menempatkannya pemenang keempat di Jawa Timur.⁹

Dalam Pemilu 1955, NU berhasil meraih posisi yang cukup kuat. NU memperoleh 45 kursi di DPR (perolehan suara 18,4% suara nasional), menjadikannya partai terbesar ketiga setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi. Kekuatan NU dalam pemilu ini menunjukkan besarnya pengaruh NU di kalangan masyarakat Muslim tradisional, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan basis-basis keagamaan seperti di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk perolehan suara NU di Madura memperoleh total 678.367. suara dari empat kabupaten utama: Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.¹⁰

⁸ Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (Seri Laporan Sementara)*, 86.

⁹ ANRI, Hasil Pemilu 1955 di Jawa Timur

¹⁰ Ahmad Rofik, *Dinamika Perilaku Pemilih NU: Pasang Surut Suara NU Pada Pemilu Paska Orde Baru*, Jurnal Aliansi Vol. 3 No.1, 2011, 424.

Sangat penting meneliti Pemilu tahun 1955 dimana ini merupakan satu peristiwa politik besar yang memperlihatkan pengaruh Nahdlatul Ulama (NU) dalam dinamika politik Indonesia. Mengkaji peran NU dalam Pemilu 1955 di Madura akan memberikan gambaran bagaimana organisasi ini, yang memiliki basis massa yang kuat di masyarakat santri, bertransformasi dari sebuah organisasi sosial-keagamaan menjadi kekuatan politik. Ini sangat penting karena memberi wawasan yang komprehensif tentang bagaimana akar politik NU berkembang dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks Madura, peran kiai sangat dominan dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Para kiai, sebagai tokoh sentral dalam masyarakat Madura, tidak hanya dipandang sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemimpin yang memiliki otoritas sosial dan politik. Hubungan patron-klien antara kiai dan masyarakat membuat para kiai mampu mengarahkan dukungan politik dan partisipasi massa. Dalam Pemilu 1955, keterlibatan kiai NU berpotensi menjadi faktor penentu dalam mengarahkan pilihan politik masyarakat Madura. Meneliti hubungan patron-klien ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang mekanisme mobilisasi politik berbasis agama dan bagaimana hubungan ini memengaruhi hasil pemilu.

Penelitian ini penting karena selain mengungkap sisi historis dari partisipasi politik NU, juga memberikan perspektif mengenai bagaimana politik berbasis agama beroperasi dalam masyarakat yang kuat tradisi Islamnya. Ini akan menjadi kontribusi besar bagi pemahaman kita tentang peran agama dalam politik Indonesia serta mekanisme mobilisasi massa

melalui hubungan patron-klien antara kiai dan masyarakat di Madura. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Partisipasi Politik NU di Madura pada Pemilu Tahun 1955 ”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dipaparkan maka penulis dapat memfokuskan penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik NU di Madura pada Pemilu tahun 1955?
2. Bagaimana kontribusi politik elemen kiai pada kemenangan partai NU di Madura?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tentu dibatasi oleh aspek spasial maupun aspek temporal agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari konteks permasalahan yang ingin dikemukakan. Untuk itu, peneliti memberikan batasan-batasan spasial maupun temporal sebagai berikut:

1. Batasan spasial, penelitian ini fokus pada peran politik NU di wilayah Madura, dimana Madura masyarakatnya adalah masyarakat islam tradisional, di mana NU dengan pendekatan Sosio-kulturanya sangat kuat dengan masyarakatnya tidak menutup kemungkinan mendukung dan memberikan pilihan suaranya terhadap partai NU.
2. Batasan temporal, sejarah tidak dapat dipisahkan dari batasan waktu, oleh karena itu peneliti menentukan batasan waktu dari tahun 1955. Peneliti memilih kurun waktu pembahasan dari tahun 1955, karena pada tahun

1955 NU mulai mengikuti Pemilu pertamanya dengan mendirikan partai NU yang di dirikan pada tahun 1952. Bukan berarti NU sebagai partai politik yang terbilang baru tidak memiliki pengalaman perpolitikan, namun sebelumnya NU sudah pernah bergabung pada partai Masyumi hingga NU keluar dan mendirikan partai sendiri. Ini adalah momen penting dalam transformasi NU dari sekadar organisasi keagamaan menjadi aktor politik yang berpengaruh.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan suatu penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya.¹¹ Dengan begitu, tujuan penelitian yaitu untuk menjawab dan menganalisis masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui partisipasi politik NU di Madura pada Pemilu tahun 1955.
2. Untuk menelusuri kontribusi politik elemen kiai pada kemenangan partai NU di Madura.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan sebuah penelitian. Kegunaan tersebut dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis. Seperti kegunaan bagi

¹¹ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.” (Jember: Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq)

penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.¹²

Adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah literatur karya ilmiah tentang partisipasi politik NU, khususnya partisipasi politik NU di Madura pada pemilu 1955.
- b. Memberikan dasar pengetahuan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan kajian serta sumber rujukan yang ingin meneliti lebih dalam lagi tentang partisipasi politik NU.
- c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

2. Manfaat Kritis

- a. Bagi peneliti
Menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait partisipasi politik NU, khususnya di Madura.
- b. Bagi lembaga

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi khalayak pembaca karya ilmiah ini, khususnya bagi kalangan akademisi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- c. Bagi masyarakat Madura

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan informasi pada

¹² Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.*” (Jember: Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq)

khalayak masyarakat Madura terkait perpolitikan di daerah Madura, di mana terdapat sebuah sejarah yang telah mengakar di Madura yang berkaitan dengan politik seperti halnya pemilu yang telah terjadi perlu diketahui oleh masyarakat Madura secara luas.

d. Bagi Organisasi Nahdlatul Ulama (NU)

Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang sejarah peran politik NU, terutama bagaimana organisasi ini membentuk identitas politik yang berbasis nilai-nilai Islam dan tradisi pesantren. Dengan mempelajari partisipasi politik NU di masa lalu, khususnya dalam Pemilu 1955, organisasi NU bisa memperkuat pemahaman kolektif anggotanya mengenai perjuangan politik yang sudah lama dilakukan, yang tetap berakar pada kepentingan umat Islam dan kepentingan nasional.

F. Studi Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti memberikan ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini memperkuat hasil penelitian dengan memperjelas dan memberikan perbedaan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karya yang ditulis oleh Herbert Feith tahun 1957, penelitian buku ini awalnya berjudul *The Indonesian Elections of 1955* pertama kali diterbitkan pada tahun 1957 oleh Cornell University, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia serta diterbitkan oleh

Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 1999. Dalam bukunya, Feith mengulas secara rinci pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia yang berlangsung dalam dua putaran, yakni pemilihan anggota DPR pada 29 September 1955 dan pemilihan anggota Konstituante pada 15 Desember 1955. Ia menekankan bahwa Pemilu ini merupakan peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika politik dan sosial yang kompleks. Selain itu, buku ini membahas peran signifikan partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI dalam proses Pemilu tersebut, namun dibalik keberhasilan pemilu 1955 ada pengeluaran dana sebesar Rp. 479.891.729 demi suksesnya Pemilu pertama.¹³ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemilihan umum 1955.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada cakupan wilayahnya, dimana penelitian ini lebih spesifik di daerah Madura saja namun pada karya tersebut lebih luas cakupannya.

2. Karya yang ditulis oleh Kuntowijoyo pada tahun 2017, berjudul *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850–1940* karya ini berawal dari disertasi doktoralnya di Columbia University pada tahun 1980. Karya ilmiah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh IRCiSoD pada tahun 2017. Buku tersebut telah menjadi salah satu referensi penting dalam kajian sejarah sosial Indonesia, terutama karena menyajikan analisis mendalam mengenai

¹³ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 129.

perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat agraris Madura pada masa penjajahan kolonial. Kuntowijoyo menggunakan pendekatan ekohistorikal untuk menganalisis perubahan sosial di Madura. Ia menyoroti bagaimana ekologi tegal yang khas di Madura, berbeda dengan ekologi sawah di Jawa, membentuk pola permukiman yang terpencar, tingginya angka migrasi keluar daerah, serta struktur sosial ekonomi yang unik.¹⁴ Kondisi ini juga memengaruhi kepribadian masyarakat Madura yang cenderung individualistik dan menempatkan ulama sebagai pemimpin politik utama. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang lanskap politik di Madura. Letak perbedaannya terletak pada temporalnya dimana penelitian tersebut pada masa kolonial sedangkan peneliti meneliti pada temporal orde lama.

3. Karya yang ditulis oleh Greg Fealy pada tahun 2003 yang berjudul *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952–1967* karya ini merupakan hasil riset akademis yang mendalam mengenai perjalanan politik NU di masa-masa krusial dalam sejarah Indonesia. Karya ini awalnya merupakan disertasi doktoral Fealy di Australian National University, dan kemudian diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia oleh LKiS Yogyakarta pada tahun 2003. Fealy memulai penelitiannya dengan mengulas latar belakang keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1952

¹⁴ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850–1940* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 8.

dan langkahnya mendirikan partai politik sendiri.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang perjuangan politik NU di Indonesia. Sementara untuk perbedaannya terletak pada sisi spasial dimana penelitian fealy cakupannya secara nasional sedangkan penelitian peneliti spesifik di Madura.

4. Karya yang ditulis oleh Huub de Jonge pada tahun 1989, yang berjudul *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam* karya ini merupakan kajian antropologi ekonomi yang mendalam, membahas perubahan sosial dan ekonomi di Pulau Madura sejak pertengahan abad ke-19. Huub de Jonge memulai buku ini dengan menjelaskan kondisi geografis dan sosial Madura, serta bagaimana pulau itu mulai terlibat dalam jaringan perdagangan nasional setelah dikuasai langsung oleh pemerintah kolonial. Penelitian lapangannya berfokus di Parindu, sebuah kota dagang penting di selatan Madura, tempat para pedagang lokal memainkan peran besar dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Di bagian akhir, ia membahas para pengusaha tembakau dari Parindu yang menguasai perdagangan di timur Madura dan menjalin hubungan dagang dengan Jawa. Kegiatan mereka semakin berkembang seiring dengan penyebaran Islam,¹⁶ yang juga memperkuat posisi sosial mereka di masyarakat. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Madura. Sementara untuk

¹⁵ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952–1967* (Yogyakarta: LkiS, 2003), 93.

¹⁶ Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), 239.

perbedaan antara karya tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya dimana pada karya tersebut lebih ke arah ekonomi sedangkan penelitian ini berfokus pada politik NU. Penelitian tersebut juga membahas NU namun hanya sedikit dan itupan ketika NU baru masuk ke Madura sebagai oraganisasi keagamaan.

5. Karya yang ditulis oleh Zidny Ilman dan Thomas Nugroho Aji pada tahun 2020, berjudul *Partisipasi Politik Muslimat NU dalam Pemilu Tahun 1955 dan 1971* yang dimuat dalam jurnal Avatara. Karya tersebut menjelaskan tentang partisipasi politik Muslimat NU pada pemilu 1955 dan 1971 sebagai bentuk emansipasi dan kesetaraan gender. Muslimat NU, sebuah organisasi di bawah naungan NU, bertujuan untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dalam politik dengan berpartisipasi aktif dalam kampanye, pemilihan kandidat, pengusulan kebijakan, dan pemantauan daftar pemilih. Meskipun menghadapi beberapa pertentangan, keterlibatan perempuan dalam politik dianggap penting untuk meminimalkan kesenjangan gender di bidang politik. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami partisipasi politik perempuan pada masa Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia.¹⁷ Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang politik NU. Persamaan lainnya antara jurnal dengan penelitian ini terletak metode penelitiannya di mana pada jurnal dan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian sejarah. Sementara perbedaan antara jurnal dengan

¹⁷ Zidny Ilman, Thomas Nugroho Aji, "Partisipasi Politik Muslimat NU dalam Pemilu Tahun 1955 dan 1971", *Jurnal Avatara*, Vol. 8, No. 1(2020): 1-8.

penelitian ini terletak pada fokusnya di mana pada jurnal fokus pada partisipasi politik Muslimat NU pada pemilu 1955 dan 1971 sebagai bentuk emansipasi dan kesetaraan gender. doktrin politik NU, sedangkan pada penelitian ini fokus pada partisipasi politik NU pada pemilu 1955 yang berada di Madura.

6. Karya yang ditulis oleh Jamiatun Hasanah pada tahun 2022, berjudul *Partisipasi Muslimat Nahdlatul Ulama dalam Pemilu 1955 di Indonesia* yang dimuat dalam skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya tersebut menjelaskan tentang partisipasi Muslimat NU dalam Pemilu 1955 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika Muslimat NU menjelang pemilu, langkah-langkah politik yang diambil, dan pengaruh partisipasi mereka pasca pemilu.¹⁸

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang politik NU. Persamaan lainnya antara skripsi dengan penelitian ini terletak metode penelitiannya di mana pada skripsi dan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian sejarah. Sementara perbedaan antara skripsi dengan penelitian ini terletak pada sekup lokasinya yang terlalu luas, yakni Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini hanya sekup wilayah Madura. Keunggulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Partisipasi politik NU di Madura pada Pemilu tahun 1955” adalah berkaca pada Pemilu pertama di Indonesia pasca kemerdekaan yang dianggap paling demokratis dan partisipatif,

¹⁸ Jamiatun Hasanah, *Partisipasi Muslimat Nahdlatul Ulama dalam Pemilu 1955 di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Sementara itu Madura dikenal sebagai wilayah dengan basis massa NU yang kuat. Meneliti bagaimana pengaruh sosial dan budaya NU diterjemahkan dalam perilaku politik masyarakat Madura akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang interaksi antara agama, budaya, dan politik di tingkat lokal. Dengan begitu peneliti memilih penelitian dengan judul **“Partisipasi politik NU di Madura pada Pemilu tahun 1955”** dimana judul ini belum pernah ada yang meneliti oleh pihak manapun.

G. Kerangka Konseptual

Analisis historis yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan kerangka kerja sosiologi dan kerangka politik. Di bidang penelitian sejarah, ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan perilaku sosial. Perilaku semacam itu secara intrinsik terkait dengan inisiatif yang dilakukan oleh gerakan tertentu. Analisis ini bertujuan untuk meneliti fenomena yang terwujud dalam masyarakat tertentu.¹⁹ Kerangka politik digunakan untuk menyelidiki karakteristik, dinamika struktural dalam ranah politik, dan pola perilaku individu dan kolektif yang memberikan pengaruh pada keadaan politik.

Aristoteles menyatakan bahwa politik memiliki makna sebagai proses pengaturan dan pengelolaan negara serta sebagai suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kenegaraan. Dalam konteks ini, politik mencakup kebijaksanaan atau tindakan yang bertujuan untuk terlibat dalam berbagai

¹⁹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), 18-19.

urusan pemerintahan. Hal ini termasuk di dalamnya penetapan berbagai aspek seperti bentuk pemerintahan, tugas yang harus dijalankan, dan ruang lingkup urusan yang dikelola oleh negara. Politik dipandang sebagai suatu permasalahan yang melibatkan beragam aktivitas dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisir, di mana pengambilan keputusan memainkan peran penting. Keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh sistem itu sendiri, tetapi juga mencakup bagaimana tujuan-tujuan tersebut akan dilaksanakan. Dalam pengertian yang lebih luas, politik dapat diartikan sebagai metode atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi yang dikemukakan oleh Herbert McClosky. Dia mendefinisikan partisipasi politik dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sukarela oleh anggota masyarakat. Melalui aktivitas-aktivitas ini, masyarakat terlibat dalam dua proses penting dalam kehidupan demokratis: pertama, mereka berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin atau penguasa, dan kedua, mereka turut berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perumusan kebijakan publik.²⁰ Teori ini digunakan untuk menganalisa mengenai motif dan tujuan yang mendasari partisipasi politik NU. Ini membantu menjelaskan alasan di balik keterlibatan mereka dalam pemilu tersebut.

Sementara itu, untuk menganalisa sisi lain, penelitian ini

²⁰ R.A. Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1988)

menggunakan teori patron klien yang dikemukakan oleh James C. Scott, hubungan patron-klien adalah sebuah ikatan khusus antara dua pihak yang tidak setara secara sosial. Dalam hubungan ini, pihak yang memiliki status dan kekuasaan lebih tinggi menggunakan pengaruh serta sumber dayanya untuk memberikan perlindungan dan manfaat bagi pihak yang lebih lemah. Sebagai gantinya, pihak yang lebih rendah memberikan dukungan, bantuan, atau layanan kepada patron sebagai bentuk balasan atas perlindungan dan perhatian yang mereka terima.²¹ Teori ini digunakan untuk menganalisa bagaimana struktur kekuasaan kiai, loyalitas politik masyarakat, dan pola mobilisasi politik. Adapun konsep-konsep yang menjadi acuan dan perlu dijelaskan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari istilah Latin *pars*, yang menandakan bagian, dan *capere*, yang menunjukkan keterlibatan dalam suatu kegiatan atau keterlibatan politik negara, sehingga berkonotasi “mengambil bagian.” Dalam bahasa Inggris, partisipasi, atau *participate*, mengacu pada mengambil bagian atau memainkan peran. Oleh karena itu, partisipasi berarti mengambil peran dalam kegiatan politik atau keterlibatan bernegara.²²

Dalam sebuah negara yang diatur oleh kerangka demokrasi, keterlibatan politik merupakan aspek fundamental dari lanskap politik,

²¹ Ng.Philipus, M.S. Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: Black Stone Press, 2004), 42.

²² Suharno, *Diktat Kuliah Sosiologi Politik* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2004), 102-103

mengartikulasikan gagasan bahwa partisipasi politik berdiri sebagai tolok ukur utama. Ini menyiratkan bahwa suatu negara memenuhi syarat sebagai demokrasi ketika badan pemerintahan memberikan penduduknya jalan yang luas untuk terlibat dalam urusan politik. Sebaliknya, masyarakat juga harus menunjukkan tingkat keterlibatan politik yang relatif tinggi. Kegagalan untuk melakukannya menimbulkan ketidakpastian pada tingkat demokrasi di dalam negara.²³

Gagasan yang dikemukakan menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan elemen penting dalam lanskap politik suatu negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Selain hanya memberi individu kesempatan untuk menggunakan hak suara mereka dalam memilih perwakilan mereka, keterlibatan warga negara dalam urusan politik lebih lanjut menandakan manfaat suatu bangsa dalam dicirikan sebagai entitas demokratis.

Partisipasi politik adalah gagasan yang diakui secara luas di bidang ilmu politik, meskipun penerapannya sering beragam, yang mengarah pada interpretasi konsep yang berbeda. Namun demikian, mayoritas cendekiawan politik setuju bahwa partisipasi politik berkaitan dengan keterlibatan individu atau kelompok dalam upaya politik. Tujuan utama dari upaya politik tersebut adalah untuk mempengaruhi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.²⁴

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Herbert McClosky dalam

²³ Kamarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 175.

²⁴ Anthonius P. Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 92.

International Encyclopedia of the Social Sciences (Edisi Kedua, 1972, hlm. 252), dan dikutip kembali oleh Miriam Budiardjo istilah 'partisipasi politik' merujuk pada aktivitas-aktivitas sukarela di mana individu dalam suatu masyarakat turut andil dalam proses seleksi penguasa. Lebih lanjut, partisipasi ini juga mencakup keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan kebijakan yang berlaku untuk umum.²⁵

Budiardjo juga berpendapat, partisipasi politik merupakan mengacu pada keterlibatan individu atau entitas kolektif dalam mengambil bagian aktif dalam bidang politik, meliputi kegiatan seperti memilih pemimpin bangsa dan memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada keputusan pemerintah (kebijakan publik). Keterlibatan ini melibatkan berbagai tindakan seperti memberikan suara selama pemilihan umum, menghadiri majelis publik, menjalin hubungan atau advokasi dengan perwakilan pemerintah atau Anggota Parlemen, bergabung dengan parpol atau gerakan sosial melalui keterlibatan langsung, dan sebagainya.²⁶

Milbrath mengartikulasikan faktor-faktor yang mengarahkan individu untuk mengambil bagian dalam partisipasi politik. Faktor-faktor ini termasuk paparan rangsangan politik melalui partisipasi reguler dalam percakapan dan debat politik formal dan informal. Selain itu, keterlibatan dipengaruhi oleh kepedulian terhadap berbagai masalah

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1.

²⁶ Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 367.

sosial seperti masalah sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Selain itu, latar belakang sosial, ekonomi, etnis, dan agama individu dapat memengaruhi keterlibatan mereka dalam ranah politik. Terakhir, pengaturan politik demokratis yang mendukung memainkan peran penting dalam menghubungkan individu ke domain politik.²⁷

A. Rahman HI berpendapat bahwa secara umum, tipologi partisipasi sebagai suatu kegiatan dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut:²⁸

- a. Partisipasi Aktif, yang mengacu pada keterlibatan dengan proses input dan output.
- b. Partisipasi Pasif, yang melibatkan fokus semata-mata pada output, biasanya ditandai dengan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan pelaksanaan keputusan pemerintah.
- c. Kelompok Kulit Putih (Abstensi) atau Kelompok Apatis, yang berasal dari penyimpangan yang dirasakan dari sistem politik yang ada dari cita-cita yang diinginkan.

2. Pola hubungan Patron - Klien

Istilah patron berasal dari bahasa Spanyol yang secara umum merujuk pada seseorang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, status sosial, dan otoritas dalam suatu hubungan sosial. Sementara itu, klien merujuk pada pihak yang berada dalam posisi lebih rendah, yaitu orang yang mengikuti, tunduk, atau bergantung pada si patron. Hubungan

²⁷ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 156-157.

²⁸ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 288.

antara keduanya membentuk sebuah pola yang disebut hubungan patron-klien, yaitu bentuk interaksi sosial antara dua pihak atau kelompok yang tidak setara secara sosial maupun ekonomi dan politik.²⁹ Dalam hubungan ini, patron berada pada posisi lebih tinggi, baik dalam hal kekuasaan, pendapatan, maupun pengaruh, sedangkan klien berada pada posisi lebih rendah dan biasanya menggantungkan diri kepada patron dalam berbagai aspek, seperti perlindungan, bantuan ekonomi, atau arahan sosial dan politik. Meskipun tidak seimbang, hubungan ini berlangsung atas dasar timbal balik: klien memberikan loyalitas dan dukungan, sementara patron memberikan perlindungan atau akses terhadap sumber daya.

Dalam banyak masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan atau komunitas yang memiliki struktur sosial tradisional, terdapat pola hubungan yang dikenal sebagai patron-klien. Hubungan ini melibatkan dua pihak dengan posisi yang tidak setara. Pihak patron merupakan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan, sumber daya, atau pengaruh sosial lebih besar. Mereka biasanya memberikan bantuan, perlindungan, atau akses terhadap sumber daya tertentu kepada pihak klien. Sebagai bentuk timbal balik, klien menunjukkan loyalitas, kepatuhan, atau dukungan terhadap patron, baik dalam urusan sosial maupun politik. Meskipun ada unsur saling menguntungkan, hubungan

²⁹ Sunyoto Usman, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIRed].) 132

ini umumnya bersifat asimetris karena klien lebih bergantung pada patron dibandingkan sebaliknya.³⁰

James C. Scott menjelaskan bahwa hubungan patron-klien merupakan bentuk interaksi sosial antara dua individu yang memiliki posisi tidak setara dalam struktur sosial-ekonomi dan politik.³¹ Dalam relasi ini, pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi baik dari segi kekuasaan, pengaruh, maupun akses terhadap sumber daya bertindak sebagai patron. Ia memberikan perlindungan, bantuan atau berbagai keuntungan lainnya kepada pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah, yaitu klien. Sebagai imbalan, klien akan memberikan loyalitas, dukungan, atau bantuan pribadi kepada patron. Hubungan ini bersifat saling menguntungkan, tetapi tetap memperlihatkan adanya ketimpangan karena peran dan kemampuan masing-masing pihak tidak seimbang.

Hubungan antara patron dan klien bisa ditemui di berbagai situasi kehidupan, salah satunya dalam kehidupan komunitas nelayan. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maulana di Desa Kuala Karang, terlihat jelas bahwa pemilik kapal berperan sebagai patron yang menyediakan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada anak buah kapalnya. Di sisi lain, anak buah kapal yang berada dalam posisi lebih lemah secara ekonomi memberikan kesetiaan dan memenuhi kewajiban

³⁰ Firdarani Kirana Rivanisa, "Pola Hubungan Patron-Klien dan Perannya dalam Pembentukan Kapital Sosial Dan Kapital Digital Petani," *INSANI*, Vol. 9, No. 1(2022)

³¹ Heddy Shri Ahimsa, *Patron & Klien di Sulawesi selatan* (Yogyakarta : Kepel Pres, 2007), 4.

mereka terhadap patron.³² Pola interaksi semacam ini menunjukkan bahwa ada struktur sosial yang bersifat bertingkat, di mana klien sangat bergantung pada patron, baik dalam urusan ekonomi maupun dalam hal jaminan sosial dan politik.

Mengacu pada uraian di atas, pola hubungan patron-klien memiliki sejumlah karakteristik utama yang menjadi ciri khas dari hubungan ini. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bagaimana hubungan sosial antara pihak yang lebih berkuasa (patron) dan pihak yang berada dalam posisi lebih lemah (klien) terbentuk, dijaga, dan dijalankan dalam berbagai konteks kehidupan sosial. Adapun poin-poin ciri hubungan patron-klien sebagaimana dijelaskan oleh Fadhilah³³ dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya interaksi timbal balik antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, bantuan atau dukungan yang diberikan oleh satu pihak dianggap bernilai dan penting oleh pihak lainnya. Sebagai bentuk penghargaan atau rasa terikat, pihak yang menerima merasa perlu memberikan balasan, baik berupa loyalitas, jasa, atau dukungan lain, sehingga terbangun relasi saling memberi yang berkelanjutan.
- b. Adanya ketimpangan antara kedua pihak yang terlibat. Perbedaan ini terlihat dari sisi kekuasaan, status sosial, maupun akses terhadap sumber daya. Dalam struktur ini, pihak yang memiliki posisi lebih kuat dan berpengaruh bertindak sebagai patron, sedangkan pihak

³² Ahmad Maulana, “ Hubungan Patron Klien pada Masyarakat Nelayan Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya,” *Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi*, Vol. 3, No. 2 (2014): 8.

³³ Amir Fadhilah dan Syamsyir Alam, *Sosiologi Pembangunan Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 174.

yang berada dalam posisi lebih lemah atau bergantung menjalankan peran sebagai klien.

- c. Adanya ikatan saling bergantung antara patron dan klien, di mana hubungan ini tidak terbatas pada urusan pekerjaan saja, melainkan meluas ke berbagai aspek kehidupan. Ketergantungan ini muncul karena kedua pihak merasa membutuhkan satu sama lain, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun perlindungan.

3. Pemilu

Pemilihan Umum adalah prosedur untuk menunjuk individu yang akan mengambil alih kepemimpinan pemerintah. Pemilihan Umum melambangkan komitmen suatu bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan berfungsi sebagai manifestasi praktis dari pemerintahan demokratis. Salah satu mekanisme tersebut melibatkan pelaksanaan hak suara oleh masyarakat selama Pemilu.³⁴

Pemilu berfungsi sebagai platform untuk proses kompetitif yang bertujuan menduduki peran politik dalam pemerintahan melalui pemungutan suara formal oleh warga negara yang memenuhi syarat. Konsep Pemilu memainkan peran penting dalam mewujudkan otoritas masyarakat, dengan tujuan utama membentuk badan pemerintahan yang sah dan menyediakan saluran untuk mengekspresikan keinginan dan keprihatinan masyarakat. Pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan metode untuk memilih individu untuk mewakili publik dalam badan

³⁴ Mukhlis et al, "Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Educandumedia*, vol. 02 no. 01 (2023): 1-22.

legislatif.³⁵

Indonesia adalah bangsa yang demokratis, sehingga menjamin kesetaraan hak, kewajiban, dan status individu tanpa bias baik dalam kedudukan hukum maupun perwakilan pemerintah. Dasar dari proses pemilihan terdiri dari beberapa prinsip utama: *Pertama*, itu langsung, memungkinkan individu untuk memilih berdasarkan hati nurani dan kehendak mereka tanpa perantara atau pengaruh yang tidak semestinya. *Kedua*, bersifat umum, berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat terlepas dari faktor-faktor seperti usia, agama, etnis, atau pekerjaan. *Ketiga*, bersifat bebas, memberikan setiap warga negara kebebasan untuk memilih kandidat pilihan mereka tanpa paksaan atau intimidasi. *Keempat*, itu rahasia, menjaga kerahasiaan setiap suara untuk menegakkan keamanan dan privasi pemilih. Selain itu yang *ke lima*, kejujuran, mewajibkan penyelenggara dan masyarakat melakukan pemilihan dengan integritas dan sesuai dengan hukum. *Keenam*, keadilan sangat penting, memastikan kesetaraan di antara semua pihak yang terlibat tanpa diskriminasi.³⁶

³⁵ Sarbaini, "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum", dalam *Jurnal Inovatif*, Vol. 8, No. 1(2015): 106-117.

³⁶ Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana dan Heru Nurgiansah, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2(2022), 3217-3225, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3295>

H. Metode Penelitian

1. Pemilihan Topik Pembahasan

Tahap awal dalam upaya penelitian melibatkan identifikasi tema dan subjek untuk penelitian. Skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik NU di Madura pada Pemilu tahun 1955” mengadopsi pendekatan analitis historis. Alasan di balik pemilihan topik khusus ini berasal dari keinginan untuk meneliti peran strategis NU, dimana NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan pengaruh politik yang signifikan. Meneliti peran politik NU memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana organisasi keagamaan dapat mempengaruhi proses politik dan pemerintahan di Indonesia. Pentingnya studi lokal dimana penelitian yang berfokus pada peran NU di Madura dapat mengisi kekosongan dalam literatur akademik yang mungkin lebih banyak menyoroti peran NU di tingkat nasional atau di daerah-daerah lain. Studi ini bisa memberikan perspektif baru dan mendalam tentang bagaimana NU beroperasi dan mempengaruhi politik lokal.

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik adalah keterampilan untuk pengumpulan sumber-sumber sejarah. Dalam hal ini, peneliti membaginya menjadi 2 jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber-sumber yang sezaman dengan pelaku sejarah. Di sini peneliti menggunakan arsip serta literatur yang sezaman

seperti, lampiran laporan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama tentang hasil Pemilihan Umum 1955, Arsip dari ANRI, serta foto-foto dan koran-koran terbitan Surabaya Post yang membahas tentang politik NU di Madura

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber tidak sezaman. Hal ini berupa sumber-sumber tertulis, seperti buku dari Herbert Feith yang berjudul Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (Seri Laporan Sementara), juga karya Greg Fealy yang berjudul Ijtihad Politik Ulama (Sejarah NU 1952-1967), serta jurnal dan artikel yang relevan dengan tema penelitian yang akan dilakukan.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber adalah tahap kedua dalam penelitian sejarah. Fungsi dari kritik sumber adalah untuk memverifikasi data guna mendapatkan keabsahan sumber. Dalam hal ini, verifikasi dibagi menjadi dua macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.³⁷

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal berfungsi untuk menilai kredibilitas (verifikasi) sumber yang diperoleh. Ketika berhadapan dengan sumber tertulis (manuskrip), proses ini melibatkan evaluasi sumber berdasarkan masanya yang menitik beratkan pada bentuk dan gaya penulisan, bahasa,

³⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), 77.

penampilan, tinta (otentisitas) hingga penyuntingan.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan evaluasi seperti bentuk dan gaya penulisan dalam dokumen-dokumen yang ada serta perubahan-perubahan yang terjadi selama waktu tersebut.

b. Kritik Internal

Kritik internal dilakukan untuk menilai kredibilitas dan keandalan sumber yang diperoleh. Dalam proses kritik internal, peneliti melakukan mengkaji ulang terhadap materi atau esensi dari sumber yang diperoleh. Evaluasi berkaitan dengan kesesuaian konten sumber yang dikumpulkan, membandingkannya dengan sumber alternatif untuk menentukan keandalannya. Selanjutnya, informasi yang dikumpulkan disusun dan diubah menjadi data historis.

4. Interpretasi (Analisis Sumber)

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering dikenal sebagai analisis historis, dimana dalam hal ini menggunakan dua metode utama yakni melibatkan analisis dan sintesis data. Analisis memerlukan pemahaman sumber yang diperoleh, sedangkan sintesis melibatkan penyatuan data yang berkaitan dengan subjek yang ada. peneliti memanfaatkan ilmu sosiologi dan politik untuk menganalisis partisipasi politik NU di Madura pada pemilu 1955.

5. Histografi (Penulisan Sejarah)

³⁸ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 96-103.

Dalam tahap ini peneliti menyajikan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan dalam sebuah karya tulis. Dalam hal ini peneliti merekonstruksi masa lalu dengan menjelaskan apa yang ditemukan dalam proses penelitian, disertai bukti argumentatif dan fakta yang akurat. Pada tahap historiografi, peneliti menekankan aspek multidimensi sehingga mampu memberikan analisis yang mendalam. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana partisipasi politik NU di Madura pada pemilu tahun 1955.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan berbentuk laporan secara sistematis supaya hasilnya dapat dipahami dengan mudah. Menyusun BAB satu ke BAB berikutnya secara sistematis dan logis merupakan bagian dari struktur perencanaan. Adapun penelitian ini terdiri dari empat BAB, yang disusun secara sistematis sebagai berikut untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian penulis yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dalam bab ini tentu sangat berguna untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai pembahasan.

BAB II PARTISIPASI POLITIK NU DI MADURA PADA PEMILU TAHUN 1955

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana NU sebagai organisasi keagamaan bertransformasi menjadi partai politik serta bagaimana perjalanan NU berkontestasi dalam politik nasional. Hingga NU berpartisipasi pada ajang pemilu 1955.

BAB III KONTRIBUSI POLITIK ELEMEN KIAI PADA PEMENANGAN PARTAI NU DI MADURA

Dalam bab ini mengulas tentang peran kiai memobilisasi massa, agenda politik, serta hasil-hasil pemilu dan dampaknya terhadap politik lokal madura.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini dapat diambil suatu kesimpulan dari persoalan yang telah menjadi rumusan masalah sebelumnya, serta beberapa saran kepada peneliti, lembaga, pembaca atau peneliti-peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

PARTISIPASI POLITIK NU DI MADURA PADA PEMILU TAHUN 1955

A. Kondisi Nasional Menuju Partai Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) memainkan peran penting dalam pergerakan nasional sebelum secara resmi memasuki arena politik praktis. Sebagai organisasi keagamaan, NU telah secara aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai inisiatif termasuk pendidikan, dakwah, dan perlawanan terhadap kolonialisme.¹ Partisipasi NU dalam pergerakan nasional memberikan modal sosial yang kuat bagi organisasi ini untuk kemudian terus berpartisipasi dalam ranah politik. NU tidak hanya menjadi wadah bagi para ulama dan santri dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam, namun juga turut serta dalam membentuk arah perjuangan nasional, terutama dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang bersifat moderat dan inklusif.

Sejak kemerdekaan, lanskap politik Indonesia diwarnai oleh kemunculan banyak berbagai partai dengan ideologi yang beragam, baik nasionalis, Islam, maupun komunis. Dalam sudut pandang NU melihat perlunya sebuah partai politik yang berlandaskan Islam, Ahlussunnah wal Jama'ah, untuk mewakili aspirasi Muslim moderat. Keputusan NU untuk terlibat dalam politik praktis pada tahun 1952 dengan membentuk Partai NU

¹ Amin Farih, "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (15 Desember 2016): 251, <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>.

didorong oleh keinginan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam akan tetap mendapat tempat dalam sistem politik Indonesia yang demokratis. Dalam hal ini, NU tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga berusaha untuk menyuarakan kepentingan umat Islam dalam politik kenegaraan.²

Selain faktor politik, NU juga menghadapi tantangan modernisasi dan perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Perubahan sosial dan politik yang terjadi sejak kemerdekaan mengharuskan NU beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai organisasi keagamaan.³ Dengan menjadi partai politik, NU berharap dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada umat Islam untuk menghadapi dinamika perubahan sosial, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebijakan publik. Kehadiran NU dalam politik praktis juga menjadi sarana bagi organisasi ini untuk melestarikan nilai-nilai Islam tradisional yang berlandaskan pada moderasi dan memastikan bahwa modernisasi berjalan seiring dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Keputusan Nahdlatul Ulama (NU) untuk terjun ke dunia politik dan bertransformasi menjadi partai sendiri didasari oleh beberapa pertimbangan strategis, salah satunya adalah perlindungan terhadap akidah Ahlul-sunnah wal Jama'ah. Sebagai organisasi keagamaan yang berkomitmen pada ajaran Islam

² Abdul Mundlir dan Septina Alrianingrum, "Peran Politik Nu Tahun 1952-1955," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 3 (Oktober 2014): 636.

³ Nurul Huda, "Peran Strategis NU (Nahdlatul Ulama) dalam Menopang Keberlanjutan Bangsa," *NU Madura: Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities* 3, no. 2 (12 Oktober 2024): 73.

moderat, NU melihat adanya tantangan dari berbagai ideologi yang dapat mengancam keutuhan ajaran Islam tradisional di Indonesia. Dengan membentuk partai politik, NU berharap dapat memperkuat posisi ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keikutsertaan dalam politik memungkinkan NU untuk mengawal kebijakan-kebijakan negara agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh mayoritas Muslim di Indonesia.⁴

NU juga memiliki visi dalam memperjuangkan keadilan sosial. Sebagai organisasi yang memiliki basis kuat di kalangan komunitas pesantren dan masyarakat bawah, NU memahami pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks politik, NU ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu, tetapi juga memberikan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Dengan menjadikan politik sebagai instrumen perjuangan, NU berupaya mewujudkan sistem sosial yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kesejahteraan bersama.⁵

Selain memperjuangkan keadilan sosial, NU juga berkepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Modernisasi dan perkembangan zaman menuntut kontribusi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, dalam menentukan arah pembangunan

⁴ Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta:LKiS, 1994), 17.

⁵ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: pendekatan fikih dalam politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 10.

bangsa. Dengan masuk ke kancah politik, NU berharap dapat membawa nilai-nilai Islam ke dalam berbagai kebijakan negara, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan moral, etika, dan spiritual masyarakat. Dilihat dari kacamata NU, politik bukan hanya sekedar alat untuk meraih kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun peradaban yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.⁶

NU melihat pembentukan partai politik sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan politik yang berkembang. Dalam sistem demokrasi, kebijakan negara sangat dipengaruhi oleh partai politik yang berkuasa, sehingga keterlibatan NU dalam politik menjadi penting untuk memastikan kepentingan umat Islam terakomodasi. Dengan memiliki kendaraan politik sendiri, NU dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional maupun daerah. Langkah ini juga memungkinkan NU untuk berkontribusi kepada bangsa dalam berbagai aspek, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun dalam pengawasan kebijakan publik, untuk memastikan prinsip-prinsip Islam tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola negara.

Transformasi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi partai politik memperkuat peran dan pengaruhnya dalam masyarakat dan politik Indonesia.⁷ Dengan memiliki kendaraan politik sendiri, NU dapat lebih

⁶ Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: pendekatan fikih dalam politik*, 11.

⁷ Laode Ida, *NU muda: kaum progresif dan sekularisme baru* (Jakarta: Erlangga, 2004),

efektif memperjuangkan kepentingan umat Islam dan mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dalam kebijakan negara. Kehadiran NU di dunia politik juga memberikan legitimasi yang lebih kuat dalam perdebatan kebijakan publik yang berkaitan dengan Islam. Selain itu, keterlibatan NU dalam politik membantu memperluas jaringan dan basis massa, baik di desa maupun di kota, memperkuat hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat. Jaringan yang luas ini tidak hanya berguna dalam pemilu, tetapi juga memperkuat solidaritas umat Islam di berbagai daerah. NU sebagai partai politik juga dapat membangun sinergi dengan berbagai elemen bangsa, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk bersama-sama membangun Indonesia.

Partisipasi NU dalam politik juga memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia, melalui pengaruh politiknya di bidang politik dan ekonomi. NU dapat mengusulkan dan mendukung kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pengembangan pendidikan pesantren, layanan kesehatan berbasis masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa politik bagi NU bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri keberadaan NU sebagai partai politik telah ikut membentuk dinamika politik Indonesia.⁸ NU memiliki kekuatan yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan nasional

7.

⁸ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKis, 2009), 149.

dan menjaga stabilitas demokrasi dengan bertindak sebagai penyeimbang dalam berbagai arus politik. Dengan mempromosikan Islam moderat, NU berperan sebagai penghubung antara agama dan negara dan berkontribusi dalam menjaga keharmonisan sosial dan keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai organisasi besar yang terjun ke dunia politik, NU menghadapi tantangan internal dan eksternal, terutama dalam aspek keuangan dan sumber daya manusia. Secara internal, NU perlu mengelola keuangannya dengan baik agar tetap independen dan tidak bergantung pada pihak-pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan organisasi. Selain itu, terbatasnya tenaga kerja terampil dalam manajemen dan administrasi politik dapat menghambat efektivitas NU dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Secara eksternal, NU harus bersaing dengan partai-partai lain yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan jaringan yang lebih kuat. NU juga menghadapi tekanan dari berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakannya. Selain itu, keterbatasan keahlian di bidang politik, ekonomi, dan administrasi menjadi tantangan tersendiri dalam memperkuat posisi NU di bidang politik. Untuk mengatasi hal ini, NU perlu membangun sistem keuangan yang transparan dan berkelanjutan serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusianya agar lebih efektif dalam menjalankan peran politik dan sosialnya.⁹

⁹ Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, 145.

Setelah perang kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali negara dan menjaga stabilitas politik. Pemerintah berupaya menata ulang sistem pemerintahan, memperkuat lembaga-lembaga negara, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi persatuan nasional. Dimana pada saat itu Indonesia menggunakan sistem politik parlementer.¹⁰ Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyelenggaraan Pemilu terdekat yang rencananya akan dilaksanakan tahun 1946, namun rencana Pemilu pertama itu gagal terlaksana. Gagalnya pemilu diakibatkan oleh beberapa kondisi yakni: Kesiapan pemerintah baru belum siap juga dalam penyusunan Undang-Undang-nya pemilu itu sendiri, serta situasi nasional saat itu belum stabil. Tujuan diadakannya Pemilu adalah untuk membentuk pemerintahan dengan legitimasi kuat di tengah masyarakat yang beragam. Pemilu ini menjadi wadah bagi berbagai kelompok politik untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi yang baru terbentuk serta mengurangi ketegangan akibat perbedaan ideologi dan kepentingan politik yang berkembang di awal kemerdekaan.

Keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia turut membentuk dinamika politik nasional, yang tercermin dalam banyaknya partai politik yang lahir pasca-kemerdekaan.¹¹ Setiap kelompok dengan latar belakang sosial dan ideologi yang berbeda mendirikan partai politik sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Pemilu 1955 menjadi momentum

¹⁰ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Cet.1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 31.

¹¹ Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 26.

penting bagi berbagai pihak untuk menyalurkan gagasan dan kepentingannya dalam sistem demokrasi yang baru berkembang. Partisipasi yang luas ini mencerminkan tingginya tingkat kemajemukan dalam politik Indonesia, sekaligus menghadirkan tantangan dalam menciptakan stabilitas nasional. Persaingan antarpolisi dengan ideologi yang berbeda menuntut adanya mekanisme yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi menjadi aspek yang sangat penting agar pluralisme politik dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan.

Dinamika politik yang semakin berkembang menjelang Pemilu 1955 juga ditandai dengan munculnya berbagai partai politik yang membawa ideologi yang beragam. Banyaknya partai politik itu merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, melalui Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat yang mengajak masyarakat untuk mendirikan partai sebagai sarana penyaluran aspirasi politik. Maklumat pertama dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 1945 dan menekankan bahwa keberadaan partai politik memiliki peran penting dalam membangun kehidupan bernegara yang demokratis.¹² Disisi lain partai-partai besar banyak yang mengusung ideologi Nasionalisme, Islam, dan komunisme. Setiap kelompok berusaha memperoleh dukungan dengan menawarkan gagasan yang sesuai dengan kepentingan dan keyakinan konstituennya. Perbedaan pandangan ini tidak

¹² Syaifruddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia* (Yogyakarta: Fawwaz Media Cipta, 2022), 98.

hanya terlihat dalam kampanye politik, tetapi juga dalam wacana publik dan perdebatan di parlemen. Persaingan ideologi semakin meningkat ketika masing-masing partai memperjuangkan posisi dan pengaruhnya dalam pemerintahan.

Selain dinamika politik yang berkembang, stabilitas keamanan juga menjadi perhatian utama menjelang Pemilu 1955. Ketegangan politik yang meningkat berpotensi memicu konflik sosial di berbagai daerah, sehingga peran TNI dalam menjaga ketertiban menjadi semakin penting. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI bertugas memastikan situasi tetap terkendali agar proses persiapan Pemilu dapat berjalan lancar. Berbagai ancaman keamanan muncul, seperti gerakan separatis dan bentrokan antar kelompok politik yang berbeda pandangan. Di tengah kondisi tersebut, TNI berupaya meredam potensi gangguan dengan mengerahkan sumber dayanya untuk menjaga keamanan di berbagai wilayah. Kehadiran TNI tidak hanya menjadi faktor utama dalam menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilu pertama di Indonesia dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib.

Di samping tantangan dalam negeri, Indonesia juga menghadapi berbagai tekanan di tingkat regional dan internasional yang turut memengaruhi situasi politik nasional. Konflik dengan Belanda mengenai status Papua Barat masih menjadi persoalan utama, karena wilayah tersebut tetap berada di bawah kendali kolonial meskipun Indonesia telah merdeka.

Ketegangan ini menuntut pemerintah untuk lebih aktif dalam diplomasi internasional guna memperjuangkan kedaulatan penuh atas Irian Jaya Barat.¹³

Sementara itu, Perang Dingin mulai berdampak pada politik dalam negeri, dengan dua kekuatan besar—blok Barat dan Timur—berusaha menarik Indonesia ke dalam pengaruh mereka. Kondisi ini semakin memperumit situasi politik nasional, di mana pemerintah harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan agar tidak terseret dalam persaingan global, sekaligus tetap fokus membangun stabilitas dan demokrasi di dalam negeri. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, konsolidasi politik dan penguatan institusi negara menjadi kunci utama agar Indonesia dapat menjalankan pemilu dengan lancar dan mewujudkan pemerintahan yang stabil serta berdaulat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memiliki basis massa yang kuat dan luas di berbagai wilayah geografis, terutama di dalam populasi pedesaan dan pusat kota yang lebih kecil.¹⁴ Penentu utama yang memperkuat kesetiaan kepada NU adalah jaringan para Kiai dan pesantren yang luas, dimana pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama tetapi juga muncul sebagai pusat penting untuk keterlibatan sosial dan politik dalam masyarakat. Bimbingan yang diberikan

¹³ Bobby Adhityo Rizaldi, Jamadin F Sianipar, dan Syaiful Anwar, “Peran Operasi Militer dalam Mendukung Upaya Diplomasi dalam Pembebasan Irian Barat,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (11 Mei 2023): 2848–58, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1749>.

¹⁴ Mukhsin Jamil et al, *Nalar islam nusantara : Studi islam ala muhammadiyah, al-irsyad, persis, dan NU* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007), 300.

oleh Kiai dan ulama dalam mengarahkan umat membuat NU sangat menarik, terutama bagi penganut tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah.

Senada dengan Martin bahwa NU pada masa awal pembentukannya hingga sekitar tahun 1942 itu masa ekspansi geografis dan bertambah pesatnya anggota. Anggota-anggota NU pada saat itu memang belum terdaftar secara struktural. Pada saat itu untuk jumlah pastinya belum ada catatan yang pasti. Namun sekitar pertengahan tahun 1930, untuk jumlah Anggota NU itu di taksir sekitar 400 orang kiai dan untuk jumlah total pengikutnya sekitar 67.000 orang.¹⁵ Di luar kerangka keagamaannya, NU telah berkembang menjadi komponen fundamental dari tatanan budaya dan sosial masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mengakar dalam adat istiadat setempat, sehingga memfasilitasi penerimaan ajarannya di berbagai kawasan.

Penguasaan kiai dan cendekiawan melampaui batas-batas domain agama, memainkan peran penting dalam membentuk wacana publik dan mempengaruhi lintasan kebijakan sosial di tingkat akar rumput. Melalui hubungannya yang mendalam dengan kehidupan komunal,¹⁶ dengan demikian NU berhasil mempertahankan dan memperkuat statusnya sebagai entitas sosial dan politik yang cukup mumpuni.

Melalui jaringan pesantrennya yang kuat, NU telah mampu memperluas pengaruhnya di berbagai daerah, memastikan penyebaran nilai-

¹⁵ Martin van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: Lkis, 1994), 48.

¹⁶ Wasisto Raharjo Jati, "Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 17 September 2013, <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2377>.

nilai Islam moderat yang sejalan dengan ajaran Ahlul-sunnah wal Jama'ah. Dengan kombinasi hirarki organisasi yang terstruktur dengan baik dan peran strategis pesantren,¹⁷ NU telah berhasil mengamankan kedudukannya sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan berpengaruh di Indonesia. Peran NU yang terus berlanjut dalam membina umat dan berkontribusi pada aspek sosial dan politik semakin memperkuat perannya dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nahdlatul Ulama (NU) selaku manifestasi dari Islam tradisional di Indonesia yang berakar pada prinsip-prinsip Ahlul-sunnah wal Jama'ah. Dengan pendekatan yang moderat dan inklusif, NU membangun hubungan yang erat dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama para santri dan institusi pendidikan. Pengaruhnya tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga dalam pembentukan identitas Islam Indonesia yang khas yang selaras dengan budaya lokal. Senada dengan apa yang disampaikan Masdar Farid Mas'udi, NU memberikan ruang berkembang bagi budaya lokal. Respon seperti itu yang membuat NU memiliki sikap moderat dan inklusif.¹⁸ NU telah mengukir sejarah panjang dalam perjuangan nasional, termasuk perannya dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Salah satu kontribusi pentingnya adalah fatwa Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, yang menyerukan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman

¹⁷ Tejo Waskito, "Pergeseran Paradigma Keislaman Nahdlatul Ulama dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Institusi Pendidikan Nahdlatul Ulama" (Masters thesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 84.

¹⁸ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 186.

Belanda. Fatwa ini memicu perlawanan besar, terutama dalam Pertempuran Surabaya, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.¹⁹ Setelah kemerdekaan, NU tetap aktif dalam pembangunan nasional melalui jalur politik dan sosial.

B. Transisi Pergolakan Politik Lokal Menjelang 1955

Sebelum Pemilihan Umum 1955, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Madura memiliki pengaruh yang cukup besar, terutama karena landasan agama tradisional yang kuat. Berbagai sekolah asrama yang terletak di seluruh wilayah Madura, termasuk di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, berfungsi tidak hanya sebagai pusat pendidikan Islam tradisional tetapi juga sebagai katalis untuk keterlibatan sosial dan politik masyarakat setempat.²⁰ Para kiai yang mengawasi pesantren ini sering mengambil peran sebagai administrator atau pendukung NU, menjadikan mereka tokoh otoritatif yang mendapat rasa hormat yang signifikan dalam masyarakat setempat.

Budaya Islam tradisional yang lazim di Madura, meliputi praktek-praktek seperti tahlilan, ziarah ke kuburan, dan peringatan Maulid Nabi, sesuai dengan doktrin dan adat istiadat yang ditegakkan oleh NU. Kesesuaian ini memfasilitasi perolehan legitimasi dan dukungan NU dari penduduk Madura. Misalnya, menurut Trisnasi dapat dicatat bahwa perspektif kiai

¹⁹ Dr H Sudirman et al., "Resolusi Jihad: Upaya Umat Muslim Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Di Surabaya Pada 1945," 4-10, t.t.

²⁰ Abdul Halim, *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*, 1 ed. (Malang: Inteligensia Media, 2019), 96-97.

sering digunakan sebagai standar untuk menilai berbagai sikap di antara penduduk Madura, yang mencakup kecenderungan politik dan agama.²¹

Para kiai di Madura memberikan pengaruh yang unggul dalam dinamika sosial dan politik penduduk setempat. Sebagai tokoh agama dan komunitas yang terhormat, kiai memiliki otoritas karismatik yang cukup besar, yang mengarah pada kepercayaan luas akan kapasitas mereka untuk membentuk lintasan politik masyarakat. Keterlibatan kiai dalam urusan politik sebagian besar otonom dari iklim politik yang berlaku yang mengharuskan keterlibatan proaktif mereka, serta munculnya jalan bagi kiai untuk terlibat dalam bidang politik.²²

Di Madura, figur kiai yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) menempati posisi strategis dalam peta sosial-politik masyarakat. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan arena kekuasaan. Ketokohan kiai tumbuh dari hubungan yang bersifat personal dan berkesinambungan dengan masyarakat, di mana penghormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka diterjemahkan menjadi dukungan yang konkret dalam konteks sosial maupun politik.²³

²¹ Evarianisa Endang Trisnani, "Jejak Pesantren di Madura; Dari Islamisasi hingga Dinamika Lembaga," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (9 Juni 2021): 52–69, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.1.52-69>

²² Mohammad Kosim, "Kyai Dan Blater (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura)," *KARSA XII*, no. 2 (Oktober 2007): 162–67.

²³ Muhamad Nastain and Catur Nugroho, "Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 1 (2022): 168–184.

Relasi ini tidak terbangun secara satu arah. Kiai juga membentuk simpul-simpul kekuasaan yang lebih luas dengan berbagai tokoh lokal seperti bangsawan (aria/sentana), kepala desa (klébun), blater, pengusaha, hingga politisi. Aliansi tersebut tumbuh dari kepentingan bersama dan saling penguatan. Kiai membawa legitimasi moral dan loyalitas massa, sementara mitra-mitra mereka menyumbang akses pada sumber daya, perlindungan, dan saluran kekuasaan yang lain. Dalam relasi ini, kekuatan tidak bersandar pada struktur formal, melainkan pada keterhubungan antar pribadi yang dibentuk oleh saling percaya dan saling menguntungkan.²⁴



Gambar 2. 1 Peta Madura

Sumber: *digitalcollections.universiteitleiden.nl*

²⁴ Teguh Anggoro, "Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif" *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN:Kajian IlmuPemerintahan dan Politik Daerah*, Volume 4, no.1, (2019): 64-74, <http://dx.doi.org/10.24905/jip.v4i1.1242>

Jaringan ini menjadi penopang utama bagi pengaruh NU di tingkat lokal. Meskipun aktor-aktornya berasal dari latar belakang sosial yang berbeda. Ada yang religius, ada pula yang sekuler atau pragmatis, mereka menyatu dalam sebuah pola hubungan yang cair namun kuat. Dinamika ini memungkinkan NU tidak hanya hadir sebagai lembaga keagamaan, melainkan juga sebagai pemain utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kekuasaan lokal. Dalam ruang ini, pertukaran dukungan dan perlindungan menjadi praktik yang wajar, sekaligus memperlihatkan bagaimana pengaruh dibangun melalui hubungan yang bersifat pribadi, timbal balik, dan bertumpu pada jaringan loyalitas.

Relasi para Kiai di Madura tidak hanya terbatas pada ranah sosial politik saja namun memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk Madura pada saat itu bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, dengan kondisi kehidupan yang relatif sederhana. Melihat juga beberapa laporan yang dilaporkan Keresidenan Madura, dimana laporan tersebut mempresentasikan pekerjaan masyarakat Madura yang beragam namun yang paling dominan adalah pekerjaan petani dan pelaut.²⁵ Situasi ini memungkinkan NU untuk lebih dekat dengan masyarakat lapisan bawah dan menjadi wadah bagi mereka untuk menyalurkan aspirasinya, terutama terkait isu-isu keadilan sosial. Kehadiran aktif NU di masyarakat agraris juga memperkuat legitimasi

²⁵ Laporan-laporan tentang distribusi pekerjaan penduduk pada abad XIX di Keresidenan Madura, lihat dalam kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940* (Jogjakarta: MATABANGSA, 2002), 220-225.

dan dukungan di tingkat lokal. Kontribusi yang signifikan di bidang ekonomi melalui jaringan pesantren yang tersebar luas di Madura. Pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi Pemilihan Umum 1955, Nahdlatul Ulama (NU) di Madura menunjukkan tingkat kesiapan organisasi yang matang melalui pembentukan jaringan yang kuat. Sejak didirikan, NU telah berhasil melembagakan cabang di berbagai wilayah Madura, termasuk Sampang, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.²⁶ Konsep organisasi terdesentralisasi ini memungkinkan komunikasi yang efektif, mobilisasi massa yang luas, dan konsolidasi politik yang efisien, sehingga memberdayakan NU untuk mengumpulkan dukungan substansial dari penduduk setempat.

Lebih jauh lagi, NU berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang terhadap ideologi yang bersaing di Madura, terutama dalam oposisi terhadap partai yang mendukung ideologi yang berbeda. Sebagai perwujudan nilai-nilai Islam tradisional, NU sering dianggap lebih selaras dengan kebutuhan penduduk pedesaan Madura jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Afinitas ini memfasilitasi perolehan legitimasi NU dan dukungan kuat dari masyarakat lokal yang melembaga dalam pondok pesantren, sehingga memperkuat posisinya dalam lanskap politik regional.²⁷

²⁶ Huub de Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam Suatu Studi Antropologi Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), 248.

²⁷ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, 538.

Sebutan Pesantren merupakan istilah asrama yang digunakan para santri yang belajar memperdalam ilmu keagamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “santri” adalah akar dari istilah “Pondok Pesantren”. Menurut kamus bahasa Indonesia, frasa ini memiliki arti: asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya.²⁸ Pondok dan pesantren juga digabungkan untuk membentuk kata pesantren. Dalam bahasa Indonesia, istilah “pondok” (kamar, gubuk, rumah kecil)²⁹ menekankan pada kesederhanaan bangunan yang mendasar. Ada juga kemungkinan bahwa kata “pondok” berasal dari kata Arab “funduk”, yang berarti tempat tidur, gubuk, atau rumah kecil. Pondok pada umumnya merupakan opsi tempat tinggal bagi para pelajar yang jauh dari rumah. Sebaliknya, kata pesantren berasal dari kata dasar “santri”, yang ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” dimana penambahan itu untuk menunjukkan tempat tinggal para santri.³⁰

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa pesantren merupakan artefak yang signifikan dalam konteks peradaban Indonesia, yang muncul sebagai lembaga pendidikan agama yang tradisional, khas, dan asli.³¹ Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai pusat penting bagi pelestarian nilai-nilai budaya dan moral yang telah terjalin erat dalam tatanan kehidupan Muslim Indonesia. Keberadaan pesantren yang telah bertahan selama berabad-abad menempatkan pesantren sebagai komponen

²⁸ <https://kbbi.web.id/pesantren> diakses 19 Februari 2025.

²⁹ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Cet. I (Jakarta: P3M, 1986).

³⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2019), 18.

³¹ Amin Haedari H. M. dkk., *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, Cet. 1 (Jakarta: IRD Prees, 2004), 3.

integral dari kerangka kerja pendidikan yang unik di Indonesia, yang membedakannya dengan sistem pendidikan Islam di negara lain. Karakter khas pesantren dimanifestasikan dalam pendekatan pedagogis yang berpusat pada tradisi, di mana hubungan antara kiai dan santri merupakan aspek fundamental dari pengalaman pendidikan. Kiai memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai pengajar pengetahuan agama tetapi juga sebagai figur penting yang memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup dimensi agama dan sosial.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan moral para santri.³² Di dalamnya, santri tidak hanya belajar ilmu-ilmu keislaman seperti fiqh, tauhid, tafsir, dan tasawuf, tetapi juga dilatih untuk hidup mandiri dan disiplin melalui sistem pendidikan berbasis asrama. Interaksi langsung antara santri dan kiai menciptakan hubungan yang erat antara guru dan murid, di mana proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pesantren selaku lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah mengakar kuat di Madura sejak zaman sebelum kolonial. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren berperan dalam membentuk karakter dan pemahaman keislaman masyarakat, terutama melalui sistem pendidikan yang

³² Riskal Fitri dan Syarifuddin Ondeng, "Pesantren Di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter," *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (Juni 2022): 42–54, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>.

berbasis pada pengajaran kitab kuning. Keberadaan pesantren di Madura tidak hanya sebagai pusat pendidikan Islam, tetapi juga merupakan bagian integral dari struktur sosial yang menghubungkan ulama, santri, dan masyarakat dalam suatu pola kehidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.³³

Sebagai tambahan pesantren juga berfungsi sebagai wadah penyebaran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang sejalan dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Melalui pengajaran disiplin ilmu seperti fikih, tauhid, tafsir, dan tasawuf, pesantren menjadi institusi utama dalam membentuk pemahaman keagamaan yang moderat berdasarkan tradisi Islam Nusantara. Nilai-nilai yang diajarkan di pesantren juga membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat Madura yang sangat menghormati ulama sebagai pemimpin spiritual dan sosial.

Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, pesantren juga merupakan pusat kaderisasi ulama dan pemimpin lokal yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Santri yang menyelesaikan pendidikan di pesantren umumnya kembali ke kampung halamannya dan menjadi tokoh agama yang disegani. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga turut serta membimbing masyarakat dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, pesantren memiliki peran penting dalam memperluas pengaruh

³³ Elvi Silvia, Zulmuqim, dan Muhammad Zainur, "Sejarah Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara: Surau, Pesantren dan Madrasah," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 8, no. 2 (27 Desember 2023): 140, <https://doi.org/10.32332/riayah.v8i2.8117>.

keagamaan di Madura dan memperkuat posisi NU sebagai organisasi keagamaan yang dominan di wilayah tersebut.³⁴

Peranan kiai dalam membimbing masyarakat menuju kebaikan sangatlah penting. Sebagai sosok yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan akhlak mulia yang sejalan dengan keilmuannya, kiai tidak hanya menjadi panutan dalam hal spiritual, tetapi juga memiliki otoritas untuk mengarahkan masyarakat untuk mengikuti ajaran-ajaran-Nya, termasuk dalam bentuk fatwa. Di Madura, kiai menempati posisi yang sangat istimewa, terutama di lingkungan pesantren. Kedekatan masyarakat dengan kiai, baik yang pernah belajar di pesantren maupun orang tua yang mempercayakan pendidikan anaknya di pesantren, menjadikan kiai sebagai figur sentral yang berpengaruh dalam kehidupan sosial dan keagamaan.³⁵

Dalam struktur sosial masyarakat Madura, kiai memiliki posisi yang sangat sentral, tidak hanya sebagai pengasuh pesantren dan guru agama, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang memiliki pengaruh luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peran kiai dalam kehidupan sosial tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai tokoh yang memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada masyarakatnya.³⁶ Kewibawaan kiai didasarkan pada kedalaman ilmu agama yang dimilikinya dan keteladanannya

³⁴ Trisnani, "Jejak Pesantren di Madura; Dari Islamisasi hingga Dinamika Lembaga." *El-Banat Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 1 (2021):53-69.

³⁵ Sukron Romadhon, "Kiai Bagi Orang Madura," dalam *International Conference on Islamic Studies (ICONIS)* (Proceedings of 4th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2020, IAIN Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia: IAIN MADURA, 2020), 35–41.

³⁶ Syafiqurrahman dan Mohammad Hosnan, "Kepemimpinan Kiai (Analisis Modalitas Kepemimpinan Kiai Kampung Dalam Tradisi Kmpolan)," *Jurnal Tafhim Ilmi* 10, no. 2 (April 2019): 17–23.

dalam mengamalkan ajaran Islam, sehingga ia menjadi panutan yang dihormati dan diikuti oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berfungsi membina, membimbing, dan menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

Sebagai penjaga moral masyarakat, kiai memiliki otoritas yang kuat dalam memberikan nasihat dan fatwa terkait berbagai aspek kehidupan, baik dalam urusan pribadi maupun sosial. Keputusan-keputusan penting dalam masyarakat, seperti pernikahan, penyelesaian sengketa keluarga, dan isu-isu sosial dan politik yang lebih luas, seringkali melibatkan pandangan dan pertimbangan seorang kiai.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kiai bukan hanya sekedar pemimpin agama, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kiai mencerminkan tingginya legitimasi moral yang mereka miliki, sehingga otoritas mereka tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial.

Peran kiai dan pesantren dalam membentuk kesadaran politik masyarakat Madura sangat signifikan. Sebagai pusat pendidikan Islam tradisional, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembelajaran agama, tetapi juga sebagai tempat internalisasi nilai-nilai sosial dan politik berbasis Islam. Para kiai yang memiliki posisi strategis sebagai pemimpin

³⁷ Jihan Amalia Syahidah, "Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura," *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (30 Desember 2022): 213–25, <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7992>.

spiritual dan sosial memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat dalam memahami arah politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tradisional.³⁸ Dengan pengaruhnya yang luas, para kiai mampu membangun kesadaran politik yang berorientasi pada kepentingan umat, menjadikan pesantren sebagai salah satu pilar utama dalam proses mobilisasi politik masyarakat Madura menjelang Pemilu 1955.

Mobilisasi politik oleh kiai di Madura terkait erat dengan hubungan mereka dengan partai politik berbasis Islam, khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Dengan otoritas moral dan sosial yang kuat, kiai menjadi penghubung antara partai dan masyarakat, berperan sebagai komunikator yang dapat menjelaskan agenda politik partai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan. Hal ini menjadikan pesantren dan jaringan ulama sebagai alat yang efektif dalam memobilisasi dukungan politik,³⁹ terutama dalam memberikan legitimasi terhadap gagasan dan kebijakan politik yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam tradisional. Dengan demikian, peran kiai dalam mobilisasi politik tidak hanya sebatas dukungan terhadap partai tertentu, tetapi juga sebagai bentuk pengawalan terhadap nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam kehidupan politik.

Di sisi lain, peran kiai dan pesantren tidak hanya sebatas mengarahkan dukungan politik, tetapi juga menjadi benteng dalam menghadapi berbagai

³⁸ Ali Topan dan Itaanis Tianah, "Persentuhan Kiai Lokal dalam Kontestasi Politik Era Reformasi di Madura: Tinjauan Sejarah" 7, no. 2 (2024): 396–420.

³⁹ Merlia Indah Prastiwi, "Politisasi Pesantren dan Pergeseran Fungsi Pesantren di Madura," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 23, no. 2 (2 Februari 2016): 208, <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.719>.

ideologi politik yang berkembang saat itu. Munculnya berbagai paham politik seperti nasionalisme sekuler, sosialisme, dan Islam modernis⁴⁰ menciptakan dinamika baru dalam lanskap politik Indonesia. Dalam konteks ini, para kiai berperan sebagai penjaga identitas Islam tradisional, berusaha mempertahankan nilai-nilai yang telah lama mengakar dalam masyarakat Madura. Dengan basis keagamaan yang kuat, mereka aktif dalam menangkal pengaruh ideologi-ideologi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, baik melalui ceramah, fatwa, maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang menguatkan pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Dengan demikian, kiai dan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai aktor politik yang mengarahkan pilihan masyarakat, tetapi juga sebagai penjaga tradisi Islam yang berperan dalam menentukan arah perkembangan ideologi politik di Madura sebelum Pemilu 1955.

Terlepas dari semua itu, pesantren dan kiai memiliki peran sangat penting dalam menjaga dan melestarikan budaya Islam tradisional yang khas di Madura. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengakar sejak masa pra-kolonial, pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga pusat pelestarian tradisi Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kiai, sebagai pemimpin pesantren, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa ajaran dan praktik keagamaan yang dianut oleh masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah. Dengan

⁴⁰ Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, 28.

demikian, pesantren berfungsi sebagai benteng budaya Islam tradisional yang tetap relevan dalam kehidupan sosial masyarakat Madura.

Salah satu bentuk nyata dari pelestarian budaya Islam tradisional adalah pelaksanaan berbagai ritual keagamaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Tradisi seperti ziarah kubur,⁴¹ tahlilan, pengajian rutin, dan peringatan hari besar Islam merupakan kegiatan yang dipertahankan dan terus diwarisi oleh pesantren. Ritual-ritual tersebut tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memperkuat identitas keislaman masyarakat dan membentuk solidaritas sosial yang erat di antara mereka. Kiai sebagai pemimpin agama berperan dalam memberikan legitimasi terhadap praktik-praktik tersebut, memastikan bahwa tradisi keagamaan yang telah lama ada tetap menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Madura.

Struktur sosial masyarakat Madura pada saat itu mencerminkan hubungan erat antara tradisi, agama dan kepemimpinan lokal. Sejalan dengan apa yang diterangkan Kuntowijoyo bahwa inti dari hubungan-hubungan sosial di Madura tidak terlepas dari para kepemimpinan dari kiai dan para guru tarekat.⁴² Dengan adanya pelapisan sosial yang terbentuk didasarkan pada hubungan antara kelompok elit tradisional, kiai, dan masyarakat umum yang terdiri dari petani dan nelayan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Madura, kiai memiliki posisi yang sangat dominan, dalam artian kiai memiliki otoritasnya sendiri, tidak hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga

⁴¹ Anantia Aulia Srirahma Devi, "Tradisi Ziarah Kubur ke Makam Sunan Ampel Sebagai Upaya Meningkatkan Ketakwaan Kepada Allah SWT," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (12 Juni 2024): 193–99, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.460>.

⁴² Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, 472.

sebagai tokoh sosial yang memiliki pengaruh luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di sisi lain, Kiai bukanlah satu satunya pemegang otoritas tunggal namun terdapat beberapa kelompok lainnya yang mempunyai otoritas sesuai dengan batasan wilayah masing-masing pemilik otoritas tersebut.⁴³ Bangsawan atau tokoh adat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, baik pada masa kolonial maupun pasca-kolonial, sehingga membentuk dinamika sosial yang unik di Madura.

Stratifikasi sosial di Madura menunjukkan bahwa kiai dalam struktur masyarakat lebih dari sekedar pemimpin agama. Mereka memiliki otoritas moral dan sosial yang membuat keputusan-keputusan mereka dihormati dan diikuti oleh masyarakat. Kiai sering menjadi panutan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam merespon perkembangan politik dan sosial. Senada dengan yang disampaikan Gusdur, kiai tidak hanya berperan dalam ranah spiritual saja namun kiai juga berperan dalam kehidupan aspek sosial yang lebih luas.⁴⁴ Sementara itu, para bangsawan yang sebelumnya memegang kekuasaan politik tetap berperan sebagai penengah dalam urusan pemerintahan, namun tidak memiliki pengaruh sebesar kiai dalam aspek sosial dan keagamaan. Petani dan nelayan sebagai kelompok terbesar dalam masyarakat tetap bergantung pada sistem sosial yang dipimpin oleh kiai dan didukung oleh nilai-nilai agama yang kuat.

⁴³ Halim, *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*, 86.

⁴⁴ Abdurrahman Wahid, *Principle of Pesantren Education, The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia* (Berlin: Technical University Berlin, 1987), 200.

Kepatuhan orang Madura biasanya berlandaskan pada hirarki *bhuppa'*, *bhabbu'*, *ghuru* dan *rato*.⁴⁵ Bagi orang Madura kepatuhan tingkat pertama adalah kepada orang tua, ini juga memuat bentuk penghormatan dan kepatuhan kepada orang tua. Setelah itu baru kepatuhan terhadap *ghuru*/kiai. Orang Madura selayaknya patuh terhadap orang tua maka lebih patuh lagi terhadap guru/kiai, kiai sebagai pemegang otoritas dapat memberikan titah terkait isu sosial, keagamaan ataupun politik dan semua perintahnya biasanya dilakukan oleh para pengikutnya. Sedangkan yang terakhir patuh terhadap birokrasi/penguasa, biasanya penghormatan/ketaatan ini bersifat formal. Dalam artian orang Madura menggunakan kategori penghormatan dan ketaatan berdasarkan aturan-aturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.⁴⁶

Ketaatan merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat Madura. Prinsip ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan sosial yang masih kuat berlandaskan adat istiadat leluhur. Salah satu bentuk nyata dari nilai ini adalah kepatuhan terhadap orang tua dan guru, yang dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan panutan moral. Dalam struktur sosial Madura, menghormati mereka bukan sekadar kewajiban, tetapi juga cerminan dari budi pekerti yang baik.⁴⁷ Sikap hormat, kesopanan, dan ketekunan menjadi ukuran utama dalam menilai karakter

⁴⁵ Muhtar Wahyudi, “‘Jurus Ombak dan Angin’ Komunikasi Politik Si Pencari Ikan,” dalam *MADURA: Masyarakat, Budaya, Media, dan Politik* (Bangkalan: Puskakom Publik dan Elmatara, 2015), 1–16.

⁴⁶ Moh Hefni, “‘Bhuppa’-Bhâbhu’-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)” XI, no. 1 (2007): 13–20.

⁴⁷ Abd Hannan dan Kudrat Abdillah, “Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura,” *Sosial Budaya* 16, No. 1 (Juni 2019): 10–24.

seseorang. Sebaliknya, mereka yang tidak menunjukkan sikap tersebut sering kali dipandang kurang beradab dan dianggap tidak menghargai nilai-nilai luhur yang telah diwariskan turun-temurun.

Terlepas dari sikap hormat dan kesopanan orang-orang Madura, daerah Madura juga tidak terlepas dari dunia perpolitikan dimana Madura menjadi ajang kontestasi politik untuk mendapatkan pundi-pundi suara, Masyarakat Madura tidak melepaskan dari keislamannya. Rujukan untuk memilih partai politik tentunya juga berlandaskan Islam. Peta politik di Madura didominasi oleh persaingan antara dua partai politik Islam utama, Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi. NU, yang berakar kuat pada tradisi Islam tradisional, berhasil mendapatkan dukungan luas di Madura. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan para ulama NU dalam memanfaatkan jaringan pesantren sebagai basis penggalangan dukungan politik, sehingga menjadikan NU sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut.⁴⁸

Sebaliknya, Masyumi, meskipun juga berbasis Islam, mempromosikan pendekatan yang lebih modernis. Pendekatan ini kurang sesuai dengan tradisi keagamaan masyarakat Madura yang kental dengan nilai-nilai Islam tradisional. Akibatnya, Masyumi menghadapi kesulitan untuk bersaing dengan NU di wilayah ini. Sebelumnya, NU masih ditubuh Masyumi yang turut andil dan menjadi tulang punggung utama partai tersebut. Seiring berkembangnya politik ditubuh Masyumi, NU memutuskan untuk menarik

⁴⁸ Idwar Anwar, "Tulang Punggung Dipungungi: Pecah Kongsi NU-Masyumi Jelang Pemilu 1955," *Al-Qolam* 26, no. 2 (November 2020): 221–424.

diri pada tahun 1952. Dalam artian NU bermetamorfosis dari lembaga sosial keagamaan menjadi sebuah partai politik. Keluarnya NU dari Masyumi menandai dimulainya babak baru dalam politik Indonesia. Pertama, NU muncul sebagai kekuatan politik independen dengan basis massa yang luas dan solid. Kedua, bagi Masyumi, kehadiran partai NU menciptakan persaingan internal di kalangan umat Islam sendiri. Ketiga, secara politik, perpecahan tersebut melemahkan posisi Masyumi yang saat itu hanya didukung oleh Muhammadiyah sebagai kekuatan utama yang tersisa.⁴⁹

Kejadian ini serupa dan pernah dialami oleh organisasi keagamaan Muhammadiyah di Madura. Ketika itu Muhammadiyah ingin melebarkan sayap-sayapnya di daerah pelosok-pelosok desa, namun masyarakat desa memberikan reaksi pertentangan terhadap gerakan reformis itu. Kuntowijoyo juga memberikan keterangan mengenai kegiatan reformis Muhammadiyah mendapat kesulitan dalam menyebarkan pengaruhnya di daerah pedalaman. Sebagaimana diketahui cabang-cabang Muhammadiyah hanya terpusat di kota. Salah satu penyebab kesulitan tersebut karena belum ada dukungan dari para kiai dan santrinya untuk membentuk cabang-cabang di desa.⁵⁰ Berbeda nasib dengan NU yang berdiri tahun 1926 di Surabaya. Ketika NU melebarkan sayap-sayapnya di daerah pedalaman Madura langsung banyak diterima banyak kalangan masyarakat. NU saat itu mengusung metode

⁴⁹ Wilayah dengan basis pendukung NU yang kuat, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan, mengalami perubahan signifikan dalam peta dukungan politik. Setelah NU memisahkan diri dari Masyumi, mayoritas massa di daerah-daerah tersebut beralih memberikan dukungannya kepada NU. Akibatnya, Masyumi kehilangan sebagian besar pendukungnya di wilayah-wilayah ini, yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan politik mereka.

⁵⁰ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, 536.

klasiknya sehingga acap kali NU dicap sebagai gerakan konservatif. Namun dengan metode tersebut NU dapat mewujudkan perubahan-perubahan sosial dan keagamaan dalam masyarakat Madura.⁵¹

Mobilisasi politik di Madura sangat dipengaruhi oleh peran kiai sebagai tokoh lokal yang memiliki otoritas keagamaan dan sosial yang kuat. Kiai tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menentukan arah politik masyarakat. Dalam struktur sosial masyarakat Madura, kiai dihormati sebagai penjaga moral dan sumber kearifan, sehingga setiap fatwa atau seruan politik yang mereka keluarkan seringkali menjadi pedoman masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Kedekatan kiai dengan masyarakat, terutama melalui pesantren dan jaringan keagamaan, menjadikan mereka sebagai aktor sentral dalam proses politik lokal.⁵²

Pesantren dan kiai menjadi pusat aktivitas yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga memegang peran penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Pesan-pesan politik disampaikan melalui forum-forum keagamaan seperti pengajian, khutbah Jumat, dan majelis ta'lim, sehingga kampanye berlangsung dalam bentuk yang familiar, tidak mengganggu tatanan sosial, dan justru diterima sebagai bagian dari bimbingan moral. Dalam konteks ini, keikutsertaan masyarakat dalam

⁵¹ de Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam Suatu Studi Antropologi Ekonomi*, 248.

⁵² Abu Aman, Achmad As'ad Abd. Aziz, dan Atiyatus Syarifah, "Figur Kiai Di Madura Perspektif Teori Pemikiran Kekuasaan (Politik) Al-Ghazali," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 20, no. 2 (4 Oktober 2023): 143–62, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v20i2.8658>.

mendukung NU menjadi bentuk keterlibatan yang tumbuh dari keyakinan dan rasa hormat terhadap otoritas keagamaan, bukan semata respons terhadap ajakan politik konvensional.⁵³

Partisipasi semacam ini memperlihatkan bagaimana orientasi politik masyarakat Madura lebih banyak dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai religius daripada oleh program rasional partai. Kedekatan emosional dan kepercayaan terhadap tokoh agama membuat instruksi politik para kiai dijalankan tanpa paksaan. Keterlibatan dalam pemilu bukan hanya dilihat sebagai hak politik, tetapi sebagai bagian dari kesetiaan terhadap komunitas dan panduan moral. Dengan begitu, aktivitas politik yang terjadi di Madura saat itu merepresentasikan bentuk partisipasi yang bersifat sukarela dan kolektif, di mana politik berjalan selaras dengan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Dalam konteks persaingan politik, kiai berperan dalam mengarahkan masyarakat untuk mendukung partai yang dianggap dapat menjaga dan memperjuangkan kepentingan Islam tradisional. NU, sebagai representasi Islam tradisional, memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Madura, sehingga dukungan terhadap partai ini merupakan bagian dari identitas keagamaan yang diwariskan melalui pesantren. Kiai tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penjaga ideologi Islam tradisional dalam menghadapi berbagai tantangan politik, baik dari kelompok

⁵³ Nurhadi dan Sunarso, "Peran Kiai dalam Membangun Partisipasi Pemilu," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (26 Desember 2018): 169, <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p169-175>.

nasionalis sekuler maupun dari kelompok Islam modernis yang memiliki pendekatan berbeda terhadap agama dan negara.⁵⁴

Dengan demikian, peran kiai dalam mobilisasi politik menjelang pemilu 1955 menunjukkan bahwa politik di Madura sangat dipengaruhi oleh jaringan ulama dan pesantren. Otoritas moral dan sosial yang mereka miliki menjadikan mereka sebagai tokoh kunci dalam mengarahkan masyarakat untuk mendukung kepentingan politik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tradisional. Keberhasilan NU dalam meraih dukungan luas di Madura tidak dapat dilepaskan dari peran kiai sebagai agen utama dalam membangun kesadaran politik dan partisipasi masyarakat.

Dinamika politik di Madura tidak hanya diwarnai oleh persaingan antar partai Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi, tetapi juga interaksi dengan ideologi lain seperti sosialisme dan komunisme. Masyarakat Madura yang dikenal religius menunjukkan resistensi terhadap ideologi-ideologi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Penentangan terhadap komunisme sangat menonjol di Madura. Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berusaha memperluas pengaruhnya, menghadapi perlawanan kuat dari para kiai dan pesantren. Para kiai, sebagai pemimpin spiritual dan sosial, memandang komunisme sebagai ancaman terhadap tatanan agama dan moral masyarakat. Keterlibatan PKI dalam aksi-aksi yang meresahkan, seperti penculikan dan kekerasan terhadap para

⁵⁴ Rojabi Azharghany, Abdul Adim, dan Hae Ruli Rusdi, "Paradigma Dakwah Islam Kyai dalam Kancan Politik Kekuasaan Pasca Kemerdekaan di Indonesia," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 2 (31 Desember 2022): 1, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i2.7184>.

pemuka agama, semakin memperkuat antipati masyarakat terhadap ideologi tersebut.⁵⁵

Ketegangan juga terjadi antara masyarakat Madura dan partai-partai nasionalis sekuler, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), dapat dipahami melalui konteks politik sektarian yang berkembang di Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959). Pada masa itu, terjadi persaingan antara partai-partai Islam, seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU), dengan partai-partai nasionalis sekuler, termasuk PNI.⁵⁶

PNI, yang didirikan pada tahun 1927, menganut ideologi nasionalisme sekuler dan berusaha menarik dukungan melalui program-program pembangunan. Namun, kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai agama membuat PNI sulit mendapatkan simpati di daerah-daerah yang memiliki basis Islam yang kuat,⁵⁷ seperti Madura. Masyarakat dengan tradisi Islam yang kuat cenderung menolak ideologi yang tidak sejalan dengan keyakinan mereka, sehingga partai-partai nasionalis sekuler menghadapi tantangan untuk mendapatkan dukungan di wilayah tersebut.

⁵⁵ Abdul Mun'im DZ, *Benturan NU-PKI 1948-1965* (Depok: Langgar Swadaya, 2013), 35-45.

⁵⁶ Tomi Nurdamarsah, "Politik Masyumi di Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959," *Herodotus: Jurnal Pendidikan Ips* 1, No. 1 (2018): 21-28.

⁵⁷ Zainurofiq, "Sejarah Konflik Ummat Islam di Indonesia," *Jurnal al-Tsaqafa* 15, no. 01 (Juli 2018): 119-38.

BAB III

KONTRIBUSI POLITIK ELEMEN KIAI PADA PEMENANGAN PARTAI NU DI MADURA

A. Agenda Politik NU di Pulau Madura

Strategi kampanye NU di Madura pada Pemilu 1955 menunjukkan praktik hubungan patron-klien yang sangat kental, di mana para kiai berperan sebagai patron yang tidak hanya memiliki otoritas keagamaan tetapi juga pengaruh sosial-politik yang luas.¹ Dalam konteks ini, masyarakat Madura sebagai klien menunjukkan loyalitasnya melalui dukungan politik terhadap NU, bukan semata karena pertimbangan ideologis atau program partai, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap patron mereka. Jaringan sosial-keagamaan yang sudah mengakar, seperti pesantren dan forum keagamaan, menjadi saluran utama dalam menjalin hubungan patron-klien ini secara kultural dan emosional.²

Para kiai menggunakan kedudukan mereka yang tinggi dalam struktur sosial masyarakat untuk menyisipkan pesan-pesan politik ke dalam dakwah dan kegiatan keagamaan rutin. Ini mencerminkan bagaimana patron menggunakan pengaruh simbolik dan spiritual untuk mengarahkan preferensi politik klien. Dalam masyarakat dengan struktur hierarkis seperti Madura,

¹ Imam Zamroni, "Juragan, Kiai dan Politik di Madura". *UNISIA*, vol. 30, no. (2007): 264-276.

² Jihan Amalia Syahidah, "Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, vol. 2, no. 2, (2022): 123-135. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7992>

perintah atau arahan dari seorang kiai tidak dipandang sebagai bentuk kampanye politis biasa, melainkan sebagai nasihat moral yang wajib diikuti.³ Dukungan politik terhadap NU menjadi bentuk timbal balik dari masyarakat atas bimbingan spiritual dan perlindungan sosial yang diberikan kiai selama ini, sesuai dengan karakter hubungan patron-klien yang bersifat saling menguntungkan, namun tidak setara.

Lebih jauh, peran santri dan alumni pesantren sebagai penyambung pesan politik NU ke masyarakat juga mencerminkan keberlanjutan sistem patron-klien secara horizontal. Santri, sebagai bagian dari lingkungan klien yang lebih dekat dengan patron, berperan menyebarkan pengaruh patron ke komunitas yang lebih luas. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai yang dijunjung patron mereka. Ketika santri turun langsung untuk berkampanye, yang dibawa bukan sekadar program partai, tetapi juga karisma dan kehendak kiai sebagai patron spiritual. Hal ini memperkuat penetrasi politik NU melalui pendekatan personal dan keagamaan, bukan hanya melalui lembaga formal.⁴

Dengan demikian, keberhasilan strategi kampanye NU di Madura pada Pemilu 1955 tidak dapat dilepaskan dari relasi patron-klien yang terjalin antara kiai dan masyarakat. Relasi ini memungkinkan NU membangun basis dukungan yang kuat melalui mekanisme sosial yang telah lama terbentuk.

³ Abd Hannan, "Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuasaan Blater dalam Pertarungan Politik Lokal Madura." *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 12, no. 2, (2018), pp. 200-220, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.122-02>

⁴ Ach Riadi, "Kiai dan Perubahan Sosial di Madura, 1935–1955." (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 77.

Loyalitas politik masyarakat terhadap NU sesungguhnya merupakan ekspresi dari loyalitas kepada patron spiritual mereka, bukan hanya kesadaran politik rasional. Strategi ini membuktikan bahwa kekuatan kultural dan religius, jika dikemas dalam relasi sosial patron-klien yang efektif, dapat menjadi instrumen politik yang sangat kuat dalam proses demokratisasi awal di Indonesia.

Peran tokoh-tokoh lokal Nahdlatul Ulama (NU) dalam menggerakkan dukungan masyarakat pada Pemilu 1955 di Madura terbukti sangat menentukan. Melalui otoritas religius yang dimiliki oleh para kiai dan hubungan historis mereka dengan masyarakat, pesantren menjadi pusat penting penyebaran pengaruh politik NU. Kiai-kiai lokal yang dipandang sebagai pembimbing spiritual juga memainkan peran sebagai penentu arah pilihan politik warga, menjadikan posisi mereka tidak hanya sebagai pemuka agama, tetapi juga aktor utama dalam arena politik elektoral.⁵

Forum-forum keagamaan seperti pengajian rutin, khutbah Jumat, hingga majelis ta'lim dimanfaatkan secara strategis untuk menyisipkan pesan-pesan politik. Aktivitas dakwah yang dilakukan kiai tidak semata menyampaikan nilai-nilai Islam, melainkan turut berfungsi sebagai wahana penyadaran politik yang halus namun efektif. Dalam struktur masyarakat yang menjunjung tinggi nasihat kiai, pesan-pesan politik yang dikemas dalam

⁵ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 92–95.

bingkai agama lebih mudah diterima tanpa menimbulkan resistensi dari jamaahnya.⁶

Sebagai bagian dari kesiapan menghadapi pemilu, NU membentuk Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu), sebuah badan yang dirancang untuk mengelola seluruh aspek kampanye.⁷ Lapunu memiliki peran vital dalam merancang strategi kemenangan, menjaring kader calon legislatif, hingga mengelola sumber daya kampanye. Para tokoh NU lokal dilibatkan aktif agar strategi yang dijalankan benar-benar sesuai dengan konteks budaya dan pola komunikasi masyarakat setempat, sekaligus memastikan keterhubungan antara struktur atas dan basis massa.

Tak kalah penting adalah keterlibatan perempuan dalam struktur kampanye NU. Melalui organisasi sayap perempuan seperti Muslimat NU, tokoh-tokoh perempuan muncul sebagai figur penting dalam menjangkau pemilih perempuan. Mereka menggelar kegiatan sosial keagamaan, pelatihan dan penyuluhan terkait pemilu, serta menyuarakan kepentingan perempuan dalam kerangka Islam. Peran ini menunjukkan bahwa perempuan NU tidak hanya menjadi pendukung pasif, melainkan aktor aktif dalam mobilisasi politik berbasis nilai-nilai agama.⁸

Kekuatan utama NU dalam Pemilu 1955 di Madura terletak pada kemampuannya mengintegrasikan jejaring sosial keagamaan, pengaruh moral

⁶ Miftah Faridl, "Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* vol. 19, no. 2 (2003): 1–10.

⁷ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 178.

⁸ Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*, 184–186.

kiai, serta partisipasi kolektif dari lapisan masyarakat lokal. Dukungan yang berhasil dihimpun bukan karena retorika politik semata, melainkan karena kepercayaan yang sudah lama terbentuk antara masyarakat dan tokoh-tokoh NU. Hal ini membuktikan bahwa strategi mobilisasi massa NU sangat efektif karena dibangun di atas fondasi sosial, budaya, dan spiritual yang kuat.⁹

Jaringan pesantren dan otoritas kiai menjadi fondasi penting dalam membangun kekuatan politik di Madura, khususnya pada masa Pemilu 1955. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk pengorganisasian massa dan penyebaran pengaruh politik. Para kiai, sebagai pemimpin pesantren, memiliki posisi sosial yang sangat dihormati, sehingga mampu membentuk preferensi politik masyarakat melalui otoritas moral dan keagamaan yang mereka miliki.¹⁰

Mengutip dari Merlia Indah Prastiwi bahwa pesantren dan kiai di Madura telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Para kiai sering dipandang sebagai tokoh spiritual yang bukan hanya memberi bimbingan keagamaan, tetapi juga menjadi simbol keteladanan dalam ucapan dan perbuatan. Status suci yang disematkan kepada mereka melahirkan loyalitas dari para pengikutnya, yang dalam

⁹ Jihan Amalia Syahidah, "Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, vol. 2, no. 2, (2022): 123-135. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7992>

¹⁰ Merlia Indah Prastiwi, "Politisasi Pesantren dan Pergeseran Fungsi Pesantren di Madura," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* Vol. 23, No. 2 (2015): 208–220. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.719>

perkembangan selanjutnya memperluas otoritas mereka ke ranah politik praktis.¹¹

Pengaruh kiai terhadap politik masyarakat tidak hanya berdiri pada kharisma pribadi, tetapi juga terbentuk dari relasi intelektual dan moral antara kiai dan santri. Posisi kiai sebagai intelektual organik membuat mereka mampu membingkai ideologi dan memobilisasi masyarakat dalam kerangka nilai-nilai Islam yang diyakini bersama. Dalam proses ini, masyarakat secara sukarela mengikuti arahan kiai karena merasa terikat oleh kedalaman spiritual dan legitimasi intelektual yang telah lama tertanam.¹²

Legitimasi politik kiai semakin kuat ketika mereka memainkan peran strategis dalam menentukan arah dukungan selama proses pemilu. Salah satu praktik umum dalam budaya politik Madura adalah tradisi "sowan" yang dilakukan oleh para calon legislatif kepada kiai untuk meminta restu dan dukungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa restu seorang kiai sering kali menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan elektoral seorang kandidat di tingkat lokal.¹³

Bahkan, keterlibatan kiai dalam politik tidak terbatas pada dukungan simbolik semata, tetapi juga melibatkan jaringan sosial pesantren sebagai basis logistik dan komunikasi politik. Melalui santri dan alumni pesantren,

¹¹ Prastiwi, "Politisasi Pesantren dan Pergeseran Fungsi Pesantren di Madura," 209-210.

¹² Zainuddin Syarif, "Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 293-311, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.500>

¹³ Jihan Amalia Syahidah, "Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 123-140.

pesan-pesan politik dapat disebarluaskan secara efektif kepada masyarakat luas, menjadikan pesantren sebagai simpul penting dalam mesin politik Nahdlatul Ulama maupun calon independen yang dekat dengan komunitas pesantren.¹⁴

Keseluruhan dinamika ini menegaskan bahwa kiai dan pesantren bukan hanya institusi keagamaan, melainkan juga aktor politik yang memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik dan arah politik masyarakat Madura. Dukungan politik yang lahir dari jaringan ini bukan semata-mata berdasarkan pilihan rasional elektoral, tetapi berakar pada kepercayaan religius dan hubungan sosial yang mendalam antara masyarakat dan tokoh agama.

B. Visi- Misi NU di Pulau Madura

Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilu 1955 menjalankan isu kampanye yang berfokus pada pelestarian nilai-nilai keislaman tradisional yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Madura. dimana NU menganggap dirinya *Ahlussunnah Waljamaah*. NU juga melihat bahwa pesantren dan kiai bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga institusi sosial yang membentuk karakter umat. Melalui jejaring pesantren yang tersebar di berbagai pelosok, para kiai menyampaikan pesan moral dan spiritual yang mendorong masyarakat untuk memilih berdasarkan pertimbangan agama. Kegiatan keagamaan rutin seperti pengajian, khutbah Jumat, dan majelis ta'lim dijadikan sarana untuk menyisipkan kesadaran

¹⁴ Syarif, "Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura," 305.

politik yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga pilihan politik warga tetap berlandaskan nilai spiritual, budaya, dan tradisi Islam yang telah lama melekat dalam masyarakat Madura.¹⁵



Gambar 3. 1 Surat Larangan Zakat Untuk Kampanye

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

Sikap tegas NU juga terlihat dari dikeluarkannya fatwa yang melarang politisasi zakat dalam konteks kampanye.¹⁶ Zakat dipandang sebagai ibadah murni yang harus dijalankan dengan keikhlasan, bukan sebagai alat untuk meraih suara. NU ingin mencegah penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan politik sesaat yang bisa merusak nilai-nilai Islam. Fatwa ini

¹⁵ Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*. Yogyakarta: LKiS, 2003), 133.

¹⁶ PB NU, "Surat-surat mengenai larangan pemungutan dan penggunaan zakat untuk pemilu" No. 2301.

menjadi bentuk tanggung jawab moral NU dalam menjaga kemurnian agama serta membimbing umat agar tidak terjebak dalam praktik politik yang mencampuradukkan urusan ibadah dengan kepentingan elektoral. Melalui langkah ini, NU memperlihatkan komitmennya dalam memisahkan ranah ibadah dari permainan politik, sembari tetap memainkan peran aktif dalam kehidupan demokrasi.

Dalam menyampaikan pesan kampanyenya, NU juga mengandalkan kekuatan simbol-simbol keagamaan yang memiliki makna historis dan emosional bagi umat. Lambang bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang melambangkan Wali Songo digunakan untuk menguatkan identitas NU sebagai penerus dakwah Islam Nusantara. Simbol ini tidak hanya menunjukkan warisan spiritual, tetapi juga membangkitkan rasa bangga dan keterikatan kultural masyarakat terhadap NU. Dengan menampilkan simbol ini di berbagai alat kampanye, NU berhasil membangun hubungan emosional yang kuat dengan konstituen, terutama mereka yang menjunjung tinggi tradisi pesantren dan nilai-nilai Islam moderat.¹⁷

NU juga mendorong partisipasi perempuan melalui Muslimat NU, organisasi sayap perempuan yang aktif dalam kampanye politik. Tokoh-tokoh seperti Nyai Mahmudah Mawardi menjadi ujung tombak dalam menyuarakan pesan-pesan politik NU kepada kalangan perempuan melalui kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial. Dengan gaya komunikasi yang santun dan menyentuh kebutuhan masyarakat, Muslimat NU berhasil menciptakan ruang

¹⁷ Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*. (Yogyakarta: LKiS, 2003), 27.

bagi perempuan untuk terlibat dalam diskusi dan keputusan politik. Inisiatif ini mencerminkan upaya NU dalam memberdayakan perempuan secara struktural dan kultural, sekaligus memperluas basis dukungan dengan menyentuh kelompok pemilih yang selama ini kurang terdengar suaranya dalam arena politik.¹⁸

Sebagai partai politik, NU secara konsisten memosisikan diri sebagai representasi dari kaum santri dan komunitas pesantren. Di tengah persaingan dengan partai-partai seperti Masyumi dan PNI, NU menonjolkan keunikan identitasnya yang berakar pada Islam tradisional dan loyal terhadap ajaran para ulama. Dengan mengangkat isu-isu moral, etika, dan warisan budaya keislaman, NU menjadikan pesantren sebagai pusat kekuatan politik yang tidak hanya religius tetapi juga berdaya sosial. Strategi ini terbukti efektif, terutama di Madura, di mana masyarakat memiliki ikatan yang kuat dengan tradisi Islam dan pesantren. Kampanye NU tidak hanya menjadi instrumen politik, melainkan juga sebagai gerakan kebudayaan yang menyatukan nilai agama, adat, dan kepentingan masyarakat dalam satu visi bersama.¹⁹

Dalam rangka meraih simpati masyarakat Madura pada Pemilu 1955, Nahdlatul Ulama (NU) menyusun serangkaian janji politik yang dirancang secara kontekstual dengan mempertimbangkan karakter keagamaan dan budaya lokal. NU memosisikan diri sebagai pelindung utama nilai-nilai

¹⁸ Zidny Ilman dan Thomas Nugroho Aji, "Partisipasi Politik Muslimat NU dalam Pemilu Tahun 1955 dan 1971," *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah* vol. 8, no. 1 (2020): 1-15, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/31846>

¹⁹ Budi Sujati, "Dinamika Partai Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Umum 1955 di Jawa Barat," *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* vol. 9, no. 1 (2020): 1-15, <https://syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6138>

Islam tradisional yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Madura, seperti amaliah tahlilan, tradisi ziarah makam leluhur, peringatan maulid Nabi, serta berbagai praktik keagamaan khas pesantren lainnya. Komitmen ini ditegaskan NU dalam setiap pidato dan materi kampanye, dengan narasi bahwa mendukung NU berarti menjaga kelestarian tradisi Islam Nusantara dari tekanan modernisasi, serta menghindarkan masyarakat dari pengaruh ideologi keagamaan transnasional yang cenderung puritan dan rigid. Pendekatan ini bukan hanya bersifat retorik, melainkan juga berakar kuat dalam misi keagamaan NU untuk merawat warisan budaya Islam lokal sebagai pilar peradaban masyarakat Madura.²⁰

Lebih dari sekadar penjaga tradisi, NU juga memproyeksikan diri sebagai kekuatan politik yang menjamin keterwakilan nilai-nilai pesantren dalam proses pemerintahan nasional. Melalui struktur seperti Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu), NU menyusun strategi yang berfokus pada pencalonan tokoh-tokoh santri dan kiai yang memiliki kedalaman ilmu agama serta kedekatan sosial dengan masyarakat.²¹ Mereka dipercaya akan mampu menyuarakan kepentingan umat di parlemen secara konsisten. Dalam konteks ini, NU tidak hanya menyasar kalangan pesantren secara eksklusif, tetapi juga menjalin hubungan dengan berbagai segmen

²⁰ Faishal Hilmy Maulida dan Moh Sonhaji, "Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu 1955," *Nyimak: Journal of Communication* 4, no. 1 (Maret 2020): 116, <http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2220>

²¹ Maulida dan Moh Sonhaji, "Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu 1955," 115.

masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, yang kerap menjadi basis pemilih loyal. Strategi ini memperlihatkan bahwa NU memiliki visi untuk menciptakan representasi politik yang berbasis spiritualitas dan kebudayaan lokal, yang membedakannya dari partai-partai lain yang cenderung berorientasi pada wacana modern sekuler atau Islam politik garis keras.

Untuk memperluas jangkauan politiknya, NU secara aktif membentuk dan menggerakkan organisasi otonom seperti Muslimat NU, Fatayat NU, dan IPNU, sebagai instrumen mobilisasi dan kaderisasi di kalangan perempuan dan generasi muda.²² Organisasi-organisasi ini tidak hanya menjalankan fungsi pendukung dalam kampanye, tetapi juga menjadi media untuk mengartikulasikan program-program pemberdayaan sosial dan pendidikan. Melalui pendekatan ini, NU ingin menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dan pemuda dalam politik tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam tradisional, melainkan merupakan bagian dari ijtihad sosial yang sejalan dengan dinamika zaman. Janji-janji politik NU yang inklusif ini menunjukkan keseriusannya dalam membangun masyarakat yang religius, berdaya, dan berdaulat secara budaya di tengah persaingan ideologis dan politik nasional yang semakin kompleks.

Perbedaan strategi politik Nahdlatul Ulama (NU) pada Pemilu 1955 antara Madura dan wilayah-wilayah lainnya menunjukkan respons organisasi ini terhadap keragaman sosial, budaya, dan keagamaan di Indonesia. Di

²² Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 140.

Madura, NU membangun platform politiknya di atas fondasi Islam tradisional yang kuat, dengan memberikan perhatian besar pada pelestarian amaliah keagamaan lokal seperti tahlilan, ziarah makam leluhur, dan peringatan Maulid Nabi. Pendekatan ini menjadi sangat relevan karena tradisi tersebut telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Madura.²³

NU di Madura mengoptimalkan jaringan pesantren dan kedudukan strategis kiai sebagai motor penggerak dalam mengonsolidasikan dukungan politik. Peran kiai tidak sebatas tokoh agama, melainkan juga menjadi figur utama dalam dinamika sosial dan politik masyarakat. Kepemimpinan mereka yang kharismatik mempermudah penyampaian agenda politik NU melalui jalur-jalur keagamaan yang telah mapan, seperti majelis ta'lim dan pengajian rutin, yang menjadikan politik dan agama menyatu dalam kesadaran kolektif masyarakat Madura.²⁴

Sementara itu, di Jawa Tengah, konfigurasi politik yang lebih plural menuntut NU untuk menyesuaikan pendekatannya. Persaingan ketat dengan partai nasionalis seperti PNI dan partai komunis seperti PKI membuat NU lebih menekankan isu-isu makro seperti pembangunan nasional dan pemerataan sosial. Dengan pemilih yang lebih heterogen dan urban, NU

²³ Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 179.

²⁴ Abd Hannan, "Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuasaan Blater dalam Pertarungan Politik Lokal Madura." *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12, No. 2, (2018): 187-222, <http://dx.doi.org/10.14421/jsa.2018/122.187-222>

cenderung menyusun strategi kolaboratif, termasuk membuka ruang kerja sama lintas partai untuk memperkuat posisi di kancah legislatif.²⁵

Di Jawa Barat, NU menghadapi realitas yang berbeda lagi. Wilayah ini dikenal sebagai basis kuat kelompok Islam modernis seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam (PERSIS). Konsekuensinya, strategi NU di daerah ini lebih bersifat protektif terhadap ajaran tradisional. Upaya politik NU banyak diarahkan pada pertahanan identitas keagamaan melalui penekanan pada nilai-nilai moral, penerapan norma-norma syariat, serta pembentukan citra partai sebagai pelindung ajaran Islam yang otentik.²⁶

Situasi lebih kompleks dijumpai di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera dan Kalimantan. Keberagaman etnis dan agama, serta minimnya basis pesantren di beberapa wilayah, menjadi tantangan tersendiri bagi NU dalam memperluas pengaruhnya.²⁷ Di daerah-daerah ini, NU lebih fokus membangun struktur kelembagaan, mengembangkan kader lokal, dan menjalin aliansi dengan komunitas-komunitas keagamaan setempat untuk memperkuat posisi politiknya secara bertahap. Secara keseluruhan, perbedaan agenda politik NU di Madura dibandingkan dengan wilayah lain mencerminkan fleksibilitas organisasi dalam membaca kondisi sosiologis

²⁵ Tsabit Azinar Ahmad, "Kampanye dan Pertarungan Politik di Jawa Tengah Menjelang Pemilihan Umum 1955." *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol 26, No 1 (2016): 45-61, <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5163>

²⁶ Rofi'i, Ahmad F., Yety Rochwulaningsih, and Alamsyah Alamsyah. "Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967." *Indonesian Historical Studies* 6, no. 1 (2022): 78-93, <https://doi.org/10.14710/jekkk.v%vi%i.13267>

²⁷ Feith, *Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 49.

masing-masing daerah. Di Madura, pendekatan berbasis tradisi dan dominasi simbolik kiai menjadi senjata utama dalam memperoleh dukungan massa. Sementara itu, di daerah lain, NU harus beradaptasi melalui kombinasi pendekatan ideologis, kelembagaan, dan koalisi strategis agar tetap relevan dan kompetitif di panggung politik nasional.

C. Hasil Pemilu dan Dampaknya Terhadap Politik Madura

Dalam Pemilu 1955, Nahdlatul Ulama (NU) memperoleh dukungan yang sangat kuat dari masyarakat Madura, sebagaimana tergambar dalam data perolehan suara di empat kabupaten di wilayah tersebut, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Data dari laporan resmi yang diterbitkan oleh Lapoeran Daerah Pemilihan Jawa Timur pada tanggal 12 Oktober 1955 menunjukkan bahwa NU menjadi kekuatan politik dominan di pulau Madura.²⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁸ ANRI. Surat-surat mengenai hasil pemilu 1955, 1971, dan 1977 di beberapa daerah, No. 2309.

RAKJAT DJAWA TIMUR
mempertajai N. U.
dgn. hasil suara sbb.:

N. U. 3.353.779
Masjumi 1.060.872
P. N. I. 2.182.465
P. K. I. 2.211.760

Hasil pemungutan suara
Seluruh Djawa Timur
menurut perintjan dibawah:

No.	Nama Daerah	N. U.	Masjumi	P. N. I.	P. K. I.
1.	Kt. Bs. Surabaya	50408	10555	41477	145140
2.	Kabpt. Surabaya	127450	26504	28455	71010
3.	" " Sidoarjo	100766	44864	45095	54054
4.	" " Mojokerto	76651	45055	75345	40004
5.	" " Djombang	148401	16568	105754	15404
6.	" " Bojonegoro	61403	10584	54641	14417
7.	" " Tuban	78130	45505	46645	10505
8.	" " Lamongan	74600	15780	48484	84404
9.	Kt. "Bs. Madiun	1434	1868	8640	18654
10.	Kabpt. Madiun	14448	16550	55045	10084
11.	" " Ngawi	34455	54477	67607	144084
12.	" " Magetan	44408	44415	58677	104414
13.	" " Ponorogo	44004	54500	74770	14447
14.	" " Pajitan	945	54504	50704	74010
15.	Kt. "Bs. Kediri	14454	4545	14045	44474
16.	Kabpt. Kediri	80705	50541	100541	14044
17.	" " Ngandjuk	65580	17078	154757	10400
18.	" " Blitar	104085	8575	65360	176805
19.	" " Tulungagung	94044	45457	64744	66544
20.	" " Trenggalek	54405	54405	66680	45544
21.	Kt. "Bs. Malang	54805	6501	45447	14504
22.	Kabpt. Malang	44444	17485	184057	104854
23.	" " Pasuruan	244855	16544	80468	54440
24.	" " Probolinggo	184055	14744	85448	10444
25.	" " Lumajang	84505	15475	19747	44540
26.	" " Bondowoso	10530	3077	74041	7704
27.	" " Panarukan	10645	7055	66580	15467
28.	" " Jember	100805	86084	165408	10008
29.	" " Banyuwangi	100880	54477	86750	15074
30.	" " Pamekasan	16455	14440	6658	745
31.	" " Sampang	156644	16475	7457	440
32.	" " Sumenep	10040	74048	48544	1478
33.	" " Bangkalan	16450	5500	44400	1004
D J U M L A H		3353779	1060872	2182465	2211760

Dalam pemungutan suara untuk Konstituante Insya Allah suara N.U. akan jauh lebih banyak.

Surabaya, 12 Oktober 1955
Lepuan Daerah Pemilihan
Djawa Timur

Partij: GPP. Ps. Bani 31.5b

Gambar 3. 2 Hasil Pemilu 1955 Di Jawa Timur

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

Kabupaten dengan perolehan suara tertinggi untuk NU adalah Bangkalan, dengan jumlah suara mencapai 161.090. Menyusul kemudian adalah Kabupaten Sampang dengan 161.554 suara, Kabupaten Pamekasan dengan 160.653 suara, dan Kabupaten Sumenep dengan 109.050 suara. Total suara yang diperoleh NU dari keempat kabupaten di Madura adalah sebesar 678.367. suara. Angka ini mencerminkan dominasi yang sangat signifikan, terutama bila dibandingkan dengan partai-partai lain seperti PNI dan PKI yang masing-masing hanya memperoleh suara belasan hingga puluhan ribu di wilayah ini.

Kuatnya dukungan terhadap NU di Madura tidak lepas dari kedekatan historis dan kultural antara NU dan masyarakat Madura. Sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berakar kuat dalam tradisi Islam pesantren, NU

memiliki pengaruh yang besar di kalangan ulama dan santri, yang jumlahnya cukup besar di Madura. Jaringan pesantren serta kharisma para kiai yang terafiliasi dengan NU memainkan peran penting dalam menggalang dukungan politik masyarakat pada masa pemilu tersebut.

Pemilu 1955 menandai titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia, khususnya dalam pembentukan lanskap kekuatan politik di daerah-daerah seperti Jawa Timur dan Madura. Sebagai pemilu demokratis pertama pasca kemerdekaan, hasil pemungutan suara ini mencerminkan secara terbuka konstelasi kekuatan partai-partai politik dan preferensi ideologis rakyat Indonesia pada masa itu. Di antara provinsi-provinsi di Indonesia, Jawa Timur menonjol sebagai arena politik yang paling kompetitif dan menentukan, dengan Nahdlatul Ulama (NU) muncul sebagai kekuatan dominan.²⁹

Kemenangan NU dalam pemilu 1955 di Jawa Timur, dengan perolehan suara mencapai 3.353.779, mengungguli PKI (2.211.760), PNI (2.182.465), dan Masyumi (1.060.872), menunjukkan konsolidasi kekuatan politik Islam tradisional yang berbasis pesantren. Hasil ini berdampak besar terhadap perubahan peta kekuasaan politik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu kawasan yang paling signifikan perubahannya adalah wilayah Madura, di mana NU meraih kemenangan mutlak.³⁰

²⁹ Abdul Mundlir, Septina Alrianingrum, "Peran Politik NU Tahun 1952–1955," *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 2, No 3, (2014):628-638.

³⁰ Ali Yansah, "Strategi Kampanye Partai Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Umum 1955" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 64.

Di Madura, NU memperoleh total 678.367. suara dari empat kabupaten utama: Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dibandingkan dengan partai-partai lain seperti PKI (yang hanya mendapatkan sekitar 1.000 suara di Bangkalan dan 10.000-an di Pamekasan dan Sampang) serta PNI (dengan perolehan suara berkisar 28.000–55.000 per kabupaten), dominasi NU tidak hanya terlihat dari jumlah suara, tetapi juga dari struktur sosial dan kultural yang menyertainya. Keberhasilan ini mengubah lanskap politik Madura dari semula didominasi pengaruh struktural negara dan elite nasionalis, menjadi dikuasai oleh kekuatan Islam tradisional berbasis pesantren.

Pasca pemilu, perubahan utama terjadi dalam penguasaan posisi-posisi politik lokal. Banyak tokoh NU yang sebelumnya hanya berperan dalam lingkup sosial keagamaan seperti pengasuh pesantren, guru ngaji, dan pemimpin organisasi masyarakat Islam kemudian masuk ke lembaga-lembaga politik formal,³¹ baik sebagai anggota DPRD tingkat kabupaten maupun perwakilan di parlemen pusat. Hal ini mempercepat proses Islamisasi politik secara struktural di tingkat lokal, terutama di Madura. Ulama tidak lagi hanya menjadi rujukan moral dan spiritual, tetapi juga menjadi penentu kebijakan publik.

Lanskap ini turut menggeser relasi kuasa antara elite tradisional (seperti bupati atau pejabat sipil) dengan ulama. Jika sebelumnya pejabat sipil

³¹ Nurlira Goncing, "Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru" *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 1, Number 1, (2015): 61-74.

lebih dominan dalam urusan pemerintahan, maka setelah pemilu, banyak keputusan politik lokal mulai melibatkan tokoh-tokoh NU. Bahkan dalam pengisian jabatan struktural daerah seperti camat atau kepala desa, pertimbangan afiliasi terhadap NU mulai diperhitungkan. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuatan elektoral NU pasca pemilu diubah menjadi kekuatan politik nyata dalam tataran pemerintahan. Senada dengan Feith yang berpendapat bahwa kemungkinan kampanye pemilihan umum sebagai alat mempercepat proses pemilikan status sosial atas ukuran yang baru.³²

Fenomena ini sekaligus mempertegas tesis Herbert Feith bahwa pemilu memberi peluang bagi aktor-aktor baru untuk memperoleh status sosial dan politik melalui kanal modern. Para tokoh NU di Madura bukan hanya mempertahankan pengaruh mereka dalam bidang keagamaan, tetapi juga memperluasnya ke ranah legislasi dan kebijakan publik — menjadikan mereka aktor utama dalam pembentukan arah pembangunan dan pemerintahan daerah.

Perubahan lanskap politik juga memengaruhi arah kebijakan pembangunan di daerah. Pemerintahan daerah yang didominasi oleh kader NU mulai menaruh perhatian lebih besar terhadap pembangunan keagamaan, seperti peningkatan anggaran untuk pendidikan madrasah, dukungan bagi pesantren, serta penguatan struktur organisasi keagamaan lokal. Ini menjadi bagian dari upaya NU untuk memperkuat basis dukungannya sekaligus

³² Feith, *Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 55.

menegaskan identitas politiknya sebagai partai Islam tradisional yang berakar dalam masyarakat.³³

Data dokumen internal warga NU Jawa Timur memperlihatkan bahwa dominasi politik tersebut tercermin secara konkret dalam struktur pimpinan DPRD, khususnya di Madura. Di Kabupaten Bangkalan, posisi Ketua DPRD dipegang oleh H. Sajuti dan Wakil Ketua oleh Abd. Karim S., di Kabupaten Sampang, Ketua DPRD dijabat oleh H. Abd. Manaf dan Wakil Ketua oleh R. Oesman, di Kabupaten Pamekasan, posisi sebagai WK. Ketua II DPRD diisi oleh Me.H. Abd. Adhim dan di Kabupaten Sumenep, jabatan Ketua DPRD dipegang oleh R. Sukandimuljo dengan WK. Ketua II DPRD R.B. Muh. Mudhar. Figur-figur tersebut, sebagian besar berlatar belakang pesantren atau tokoh agama, menandai keberhasilan transformasi NU dari kekuatan sosial-keagamaan menjadi kekuatan politik formal yang menguasai lembaga legislatif daerah.³⁴

³³ Nurfaizin, "Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus Pada Pemilukada Di Kabupaten Sumenep Tahun 2010" *Jurnal Sosiologi Reflektif* , Vol. 11, N0. 2 (2017), 52. <https://doi.org/10.14421/JSR.V11I2.1352>

³⁴ ANRI. Surat-surat mengenai pelaksanaan kampanye, usaha pemenangan persiapan pemilu dari Partai NU dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). No. 2295.

Tabel 3. 1 Daftar Nama-Nama Ketua/WK Ketua DPRD NU Se Madura

Kabupaten	Nama	Jabatan
Bangkalan	H. Sajuti	Ketua DPRD
	Abd. Karim S.	WK. Ketua DPRD
Sampang	H. Abd. Manaf	Ketua DPRD
	R. Oesman	WK. Ketua DPRD
Pamekasan	Me.H. Abd. Adhim	WK. Ketua II DPRD
Sumenep	R. Sukandimuljo	Ketua DPRD
	R.B. Muh. Mudhar	WK. Ketua II DPRD

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

Keterlibatan aktif tokoh-tokoh NU dalam jabatan strategis tersebut membawa sejumlah dampak penting terhadap politik Madura. *Pertama*, kekuasaan politik lokal semakin berbasis pada otoritas ulama. Figur kiai menjadi pusat rujukan dalam pengambilan keputusan, baik dalam urusan keagamaan maupun pemerintahan. *Kedua*, sentimen religius tradisional menjadi landasan utama dalam perilaku politik masyarakat, yang menyebabkan loyalitas elektoral terhadap NU sangat tinggi dan sulit digoyahkan oleh kekuatan politik lain. *Ketiga*, terbentuknya oligarki keagamaan, di mana elite ulama memegang kendali tidak hanya di bidang sosial, tetapi juga di dalam struktur pemerintahan, menyebabkan kontrol sosial-politik menjadi sangat terpusat. *Keempat*, arah kebijakan publik menjadi lebih religius-sentris, dengan prioritas pada pembangunan pendidikan Islam, pesantren, dan institusi keagamaan. *Kelima*, dominasi ini memperkuat identitas politik Madura sebagai basis kekuatan NU, yang bertahan kuat hingga dekade-dekade berikutnya.

Secara keseluruhan, Pemilu 1955 telah merestrukturisasi lanskap politik di Jawa Timur, khususnya Madura. NU tidak hanya tampil sebagai

pemenang dalam kontestasi suara, tetapi juga berhasil mentransformasikan kekuatan sosial-keagamaannya menjadi kekuatan politik formal yang dominan. Perubahan ini mengakar kuat dan menjadi fondasi bagi pola politik Madura yang, hingga dekade-dekade berikutnya, tetap menunjukkan loyalitas tinggi terhadap NU dan nilai-nilai Islam tradisional.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, partisipasi politik NU di Madura tidak bisa dilepaskan dari kekuatan kultural dan religius yang telah tertanam kuat sejak sebelum kemerdekaan. Dari uraian dan analisis yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, partisipasi politik Nahdlatul Ulama (NU) di Madura pada Pemilu 1955 merupakan cerminan dari keberhasilan NU dalam mentransformasikan diri dari organisasi keagamaan menjadi kekuatan politik yang signifikan. Keikutsertaan NU dalam Pemilu 1955 didorong oleh kebutuhan akan representasi politik Islam tradisional dalam panggung nasional. Di Madura, partisipasi ini diperkuat oleh struktur sosial keagamaan yang mapan, terutama melalui peran sentral kiai dan pesantren sebagai basis dukungan. Para kiai berhasil memobilisasi masyarakat Madura dengan pendekatan keagamaan yang bersifat emosional dan kultural, menjadikan NU memperoleh suara mayoritas dalam kontestasi politik tingkat lokal.

Kedua, peran kiai di Madura pada Pemilu 1955 tidak hanya tampak dari hasil perolehan suara, tetapi juga dalam membentuk konfigurasi politik yang berakar pada nilai-nilai Islam tradisional. NU berhasil menciptakan jaringan kekuatan politik berbasis pesantren yang tidak hanya efektif dalam kampanye elektoral, tetapi juga berpengaruh dalam proses pembentukan opini

publik dan kebijakan lokal. Kemenangan NU menjadi bukti bahwa politik berbasis nilai agama dan budaya lokal mampu menjadi kekuatan dominan dalam demokrasi parlementer Indonesia saat itu.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Bagi lembaga Nahdlatul Ulama (NU), hasil penelitian ini dapat dijadikan refleksi historis mengenai bagaimana basis sosial dan jaringan pesantren telah memainkan peran penting dalam kontestasi politik demokratis. Oleh karena itu, NU di masa kini perlu mempertahankan nilai-nilai partisipatif dan semangat keterlibatan politik yang berlandaskan etika dan nilai keislaman. Sekaligus dapat mengembangkan pendidikan politik kader yang tetap berpijak pada kearifan lokal serta memperkuat hubungan kultural dengan masyarakat akar rumput.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk memperluas kajian terkait partisipasi politik NU secara lebih komprehensif. Peneliti selanjutnya dapat mencoba menggunakan metode yang berbeda seperti metode penelitian lapangan (*field research*) untuk menggali data langsung dari narasumber atau komunitas yang relevan. Selain itu, fokus penelitian dapat diperluas, misalnya dengan membandingkan partisipasi politik NU di wilayah lain atau melakukan kajian

komparatif antara Pemilu 1955 dengan pemilu-pemilu berikutnya. Hal ini penting untuk melihat dinamika perubahan politik NU dari masa ke masa serta relevansi historisnya terhadap perkembangan politik kontemporer.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aman A, et al. "Figur Kiai Di Madura Perspektif Teori Pemikiran Kekuasaan (Politik) Al-Ghazali." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, vol. 20, no.2 (4 Oktober 2023): 143–62. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v20i2.8658>.
- Ahmad, Rofi'i, Yety Rochwulaningsih, and Alamsyah. "Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952–1967." *Indonesian Historical Studies* 6, no.1 (2022): 78–93. <https://doi.org/10.14710/jekk.v%vi%i.13267>.
- Ahmad, Tsabit Azinar. "Kampanye dan Pertarungan Politik di Jawa Tengah Menjelang Pemilihan Umum 1955." *Paramita: Historical Studies Journal* 26, no. 1 (2016): 45–61. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5163>.
- Amalia Syahidah, Jihan. "Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 123–135. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7992>.
- Anantia Aulia Srirahma Devi. "Tradisi Ziarah Kubur ke Makam Sunan Ampel Sebagai Upaya Meningkatkan Ketakwaan Kepada Allah SWT." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (12 Juni 2024): 193–99. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.460>.
- Anggoro, Teguh. "Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif." *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 4, no. 1 (2019): 64–74. <http://dx.doi.org/10.24905/jip.v4i1.1242>.
- Anwar, Idwar. "Tulang Punggung Dipunggungi: Pecah Kongsi NU-Masyumi Jelang Pemilu 1955." *Al-Qolam* 26, no. 2 (November 2020): 221–424.
- Azharghany, Rojabi, Abdul Adim, dan Hae Ruli Rusdi. "Paradigma Dakwah Islam Kyai dalam Kancah Politik Kekuasaan Pasca Kemerdekaan di Indonesia." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 2 (31 Desember 2022): 1. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i2.7184>.
- Faridl, Miftah. "Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 19, no. 2 (2003): 1–10.

- Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (15 Desember 2016): 251. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>.
- Fitri, Riskal, dan Syarifuddin Ondeng. "Pesantren di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter." *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (Juni 2022): 42–54. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>.
- Goncing, Nurlira. "Politik Nahdlatul Ulama dan Orde Baru." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 61–74.
- Haboddin, M. . "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal." *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3 no.1, (2013), 109–126.
- Hannan, Abd, dan Kudrat Abdillah. "Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi Sosial Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura." *Sosial Budaya* 16, no. 1 (Juni 2019): 10–24.
- Hannan, Abd. "Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuasaan Blater dalam Pertarungan Politik Lokal Madura." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 2 (2018): 200–220. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.122-02>.
- Hefni, Moh. Bhuppa'-Bhābhu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura). XI, no. 1 (2007): 13–20.
- Huda, Nurul. "Peran Strategis NU (Nahdlatul Ulama) dalam Menopang Keberlanjutan Bangsa." *NU Madura: Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities* 3, no. 2 (12 Oktober 2024): 73.
- Ilman, Zidny dan Thomas Nugroho Aji. "Partisipasi Politik Muslimat NU dalam Pemilu Tahun 1955 dan 1971." *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah* 8, no.1(2020):1–15. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/31846>.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 17 September 2013. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2377>.
- Maulida, Faishal Hilmy dan Moh Sonhaji. "Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu 1955." *Nyimak: Journal of Communication* 4, no. 1 (2020): 115–116. <http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2220>.

- Mujiati Siti Honiah, Ulfiah, Nurjaman. 2022. "Relasi Aswaja An-Nahdliyah dan Negara", *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam* Vol. 7 No.1. <https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v7i1.570>.
- Mundlir, Abdul dan Septina Alrianingrum. "Peran Politik NU Tahun 1952–1955." *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 3 (2014): 628–638.
- Nastain, Muhamad dan Catur Nugroho. "Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 1 (2022): 168–184.
- Nurdamarsah, Tomi. "Politik Masyumi di Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959." *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS* 1, no. 1 (2018): 21–28.
- Nurfaizin, "Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus pada Pemilukada di Kabupaten Sumenep Tahun 2010" *Jurnal Sosiologi Reflektif* , Vol. 11, N0. 2 (2017), 52. <https://doi.org/10.14421/JSR.V11i2.1352>
- Nurhadi, dan Sunarso. "Peran Kiai dalam Membangun Partisipasi Pemilih." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (26 Desember 2018): 169. <https://doi.org/10.17977/Um019v3i2p169-175>.
- Prastiwi, Merlia Indah. "Politisasi Pesantren dan Pergeseran Fungsi Pesantren di Madura." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 2 (2015): 208–220. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.719>.
- Ramdhani Firmansyah. L, Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955, *Jurnal Avatara*, 1 no.1, (2013)
- Rizaldi, Bobby Adhityo, Jamadin F Sianipar, dan Syaiful Anwar. "Peran Operasi Militer Dalam Mendukung Upaya Diplomasi dalam Pembebasan Irian Barat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (11 Mei 2023): 2848–58. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1749>.
- Rofik. A, Dinamika Perilaku Pemilih NU: Pasang Surut Suara NU Pada Pemilu Paska Orde Baru, *Jurnal Aliansi* 3 no.1, (2011)
- Sekar, A.M. Bagus S. Wartp. W, S. Insiwy Febriary.2021. "Cleric Depoliticization of the NU Pesantren in Former Karesidenan Surakarta at the New Order Era (1971-1997), *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(2). <http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v31i2.27051>.
- Silvia, Elvi, Zulmuqim, dan Muhammad Zainur. "Sejarah Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara: Surau, Pesantren dan Madrasah." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 8, no. 2 (27 Desember 2023): 140. <https://doi.org/10.32332/riayah.v8i2.8117>.

Sudirman, et al. "Resolusi Jihad: Upaya Umat Muslim dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Surabaya pada 1945." tt.

Sugitanata. A, Abdul Majid, Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, *Jurnal Qoumiyyah*, 2 no.1, (2021)

Sujati, Budi. "Dinamika Partai Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Umum 1955 di Jawa Barat." *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (2020):1–15.
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6138>.

Syafiqurrahman, dan Mohammad Hosnan. "Kepemimpinan Kiai (Analisis Modalitas Kepemimpinan Kiai Kampung Dalam Tradisi Kompolan)." *Jurnal Tafhim Ilmi* 10, no. 2 (April 2019): 17–23.

Syarif, Zainuddin. "Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 293–311.
<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.500>.

Topan, Ali, dan Itaanis Tianah. "Persentuhan Kiai Lokal dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah" 7, no. 2 (2024): 396–420.

Trisnani, Evarianisa Endang. "Jejak Pesantren di Madura; dari Islamisasi hingga Dinamika Lembaga." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (9 Juni 2021): 52–69.
<https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.1.52-69>.

Zainurofiq. "Sejarah Konflik Ummat Islam di Indonesia." *Jurnal al-Tsaqafa* 15, no. 01 (Juli 2018): 119–38. Zamroni, Imam. "Juragan, Kiai dan Politik di Madura." *Unisia* 30, no. 65 (30 Juli 2007): 264–76.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art5>.

Zamroni, Imam. "Juragan, Kiai dan Politik di Madura." *UNISIA* 30, no. 3 (2007): 264–276.

Skripsi

Hasanah, Jamiatun. "Partisipasi Muslimat Nahdlatul Ulama dalam Pemilu 1955 di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Riadi, Ach. "Kiai dan Perubahan Sosial di Madura, 1935–1955." Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Waskito, Tejo. "Pergeseran Paradigma Keislaman Nahdlatul Ulama dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Institusi Pendidikan Nahdlatul Ulama." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Yansah, Ali. "Strategi Kampanye Partai Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Umum 1955." Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Buku

Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.

Ahmady, Noor. *Pesantren dan Kewirausahaan (Peran Pesantren Sidogiri Pasuruan dalam Mencetak Wirausaha Muda Mandiri)*. Surabaya: Uinsby Prees, 2013.

Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Cet.1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Bakry, Umar Suryadi. *Multikulturalisme dan Politik Identitas*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Bruinessen, Martin van. *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: Lkis, 1994.

Buchari, Sri Astuti. *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024.

Chalik, Abdul. *Nahdlatul Ulama dan geopolitik: perubahan dan kesinambungan*. Sleman, Yogyakarta: Pital, 2011.

Dewi, Susi Fitria. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Gre Publishing, 2017.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2019.

Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Fathoni, Khoirul. *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Cetakan 4. Yogyakarta: LKis, 2009.

H. M., Amin Haedari, Abdullah Hanif, Anis Masykur, dan Mukhtari Adib. *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*. Cet. 1. Jakarta: IRD Prees, 2004.

Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: pendekatan fikih dalam politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

- Halim, Abdul. *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*. 1 ed. Malang: Inteligensia Media, 2019.
- Haris, Syamsudin. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Hasan Usman. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Herbert, Feith. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (Seri Laporan Sementara)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.
- Ida, Laode. *NU muda: kaum progresif dan sekularisme baru*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Indra, Hasby. *Pesantren dan Transformasi Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komlesitas Global*. Jakarta: IRD Prees, 2004.
- Jamil, Mukhsin, Musahadi, Choirul Anwar, dan Abdul Kholiq. *Nalar islam nusantara : Studi islam ala muhammadiyah, al-irsyad, persis, dan NU*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007.
- Jonge, Huub de. *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam Suatu Studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Jurdi, Syaifuddin. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Yogyakarta: Fawwaz Media Cipta, 2022.
- Kosim, Mohammad. *KYAI DAN BLATER (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura)*. *KARSA* XII, no. 2 (Oktober 2007): 162–67.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*. Jogjakarta: MATABANGSA, 2002.
- Mun'im DZ, Abdul. *Benturan NU-PKI 1948-1965*. Depok: Langgar Swadaya, 2013.
- Nur, Nur Khalik Ridwan. *NU dan Bangsa 1914–2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Rahman, Taufiq. *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004.

Romadhon, Sukron. *Kiai Bagi Orang Madura Dalam International Conference on Islamic Studies (ICONIS)*, 35–41. IAIN Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia: IAIN MADURA, 2020.

Sastropoetra, R.A. Santoso. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni, 1988.

Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Syaifulloh. *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Usman, Hasan. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.

Wahid, Abdurrahman. *Principle of Pesantren Education, The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*. Berlin: Technical University Berlin, 1987.

Wahyudi, Muhtar. *JURUS OMBAK DAN ANGIN Komunikasi Politik Si Pencari Ikan. Dalam MADURA: Masyarakat, Budaya, Media, dan Politik*, 1–16. Bangkalan: Puskakom Publik dan Elmatara, 2015.

Ziemek, Manfred. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Cet. I. Jakarta: P3M, 1986.

Website

https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf. (10 Mei 2024)

<https://kbbi.web.id/pesantren> (19 Februari 2025)

Dokumen

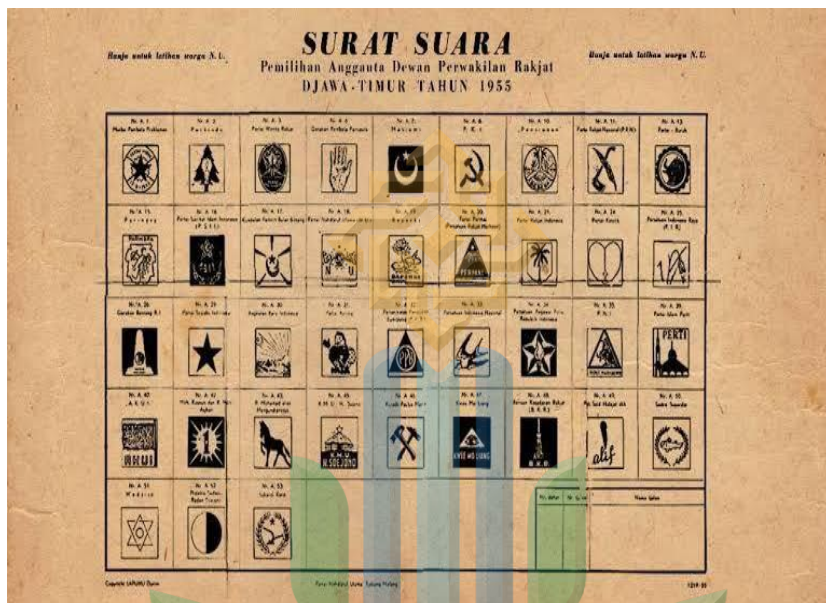
ANRI. Surat-surat mengenai hasil pemilu 1955, 1971, dan 1977 di beberapa daerah. No. 2309, 10 Mei 2025

ANRI. “Surat-surat mengenai larangan pemungutan dan penggunaan zakat untuk pemilu.” No. 2301, 7 Mei 2025

ANRI, Surat-surat mengenai pelaksanaan kampanye, usaha pemenangan persiapan pemilu dari Partai NU dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). No. 2295, 10 Mei 2025



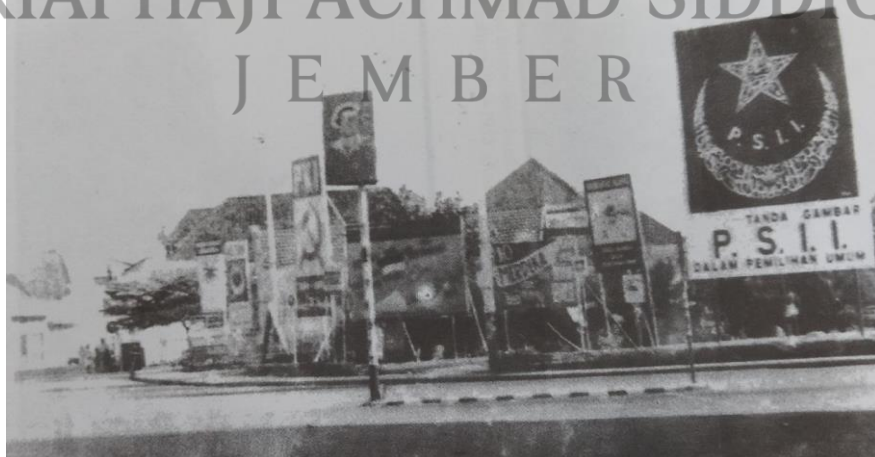
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar: Contoh surat suara yang digunakan NU dalam sosialisasi pemilu 1955

Sumber: KPU DIY

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Gambar: Tanda gambar peserta pemilu 1955 di jalan raya

Sumber: Koleksi Djapen: 1A. 55. 204

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Diyauddin
NIM : 211104040014
Program Studi : Sejarah dan Peradapan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

J E M B E R

Jember, 23 Mei 2025



Moh. Diyauddin

211104040014

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Moh. Diyauddin
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 01 September 2002
Jenis Kelamin : Laki- laki
Alamat : Seratimur, Bluto, Sumenep
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi : Sejarah dan Peradapan Islam
NIM : 211104040014

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Islam
2. MI Tarbiyatul Athfal
3. MTs Nurul Islam
4. MA Nurul Islam
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)